

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah Kota Padang Panjang memasuki babak baru dalam pelaksanaan pembangunan yakni periode lima tahunan ketiga RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 yang memiliki Visi “KOTA YANG MAJU, LESTARI, DAN ISLAMI”. Dengan telah berakhirnya jabatan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang periode 2013-2018, melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah terpilih dan dilantik Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Fadly Amran dan Asrul untuk periode 2018-2023 pada tanggal 9 Oktober 2018.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah harus menyiapkan RPJM Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta program Kepala Daerah, dimana penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Pemerintah Provinsi yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional diperlukan untuk perencanaan pembangunan yang akan berperan sebagai pendorong yang berperan mengendalikan proses pembangunan secara lebih cepat dan terarah. Untuk mengakomodir

hal tersebut, maka Pemerintah Kota Padang Panjang telah merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019. Pelaksanaan dari RPJMD tersebut dijabarkan dalam Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Sekretariat Daerah Kota sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Padang Panjang tentunya harus berkontribusi dalam mensukseskan pembangunan daerah yang akan dirumuskan menjadi Renstra SKPD yang akan memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang pada Misi 2 dan Misi 3. sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang akan menjadi pedoman bagi perencanaan strategis dalam 5 tahun mendatang untuk periode 2018-2023.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 ;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025.
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2019;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud :**

Adapun maksud dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah adalah agar tersedianya suatu dokumen rencana strategis yang sistematis, terarah, terpadu, komprehensif yang memungkinkan adanya konsistensi perumusan perencanaan program dan kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

#### **Tujuan :**

Tujuan dari penyusunan Renstra ini antara lain adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Secara terinci tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk kurun 5 (lima) tahun kedepan;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dengan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang;
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini dipaparkan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

Dalam Bab ini dipaparkan Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang meliputi Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumberdaya, Kinerja Pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Dalam Bab ini dipaparkan tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada Bab ini Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk lima tahun kedepan (tahun 2018-2023).

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
Dalam Bab ini dipaparkan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk lima tahun kedepan (tahun 2018-2023).
- BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN SEKRETARIAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**  
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD untuk lima tahun kedepan (tahun 2018-2023).
- BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang**

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang merupakan salah satu Perangkat Daerah, yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam Pasal 2 Perwako Kota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2018 ditegaskan bahwa Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Selanjutnya dalam pasal ini dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Memahami apa yang telah dikemukakan di atas, maka Sekretariat Daerah disamping sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

#### **1. Staf Ahli.**

##### **a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik ;**

Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota.

##### **b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;**

Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota

##### **c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM;**

Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu

menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota.

## **2. Asisten.**

### **a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Trantibum dan Linmas, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perpustakaan, Kearsipan, Keagamaan, Kecamatan, penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum, perlindungan dan penegakan hak azazi manusia, serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- Dinas Kesehatan;
- Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- Kecamatan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

#### **a.1 Bagian Pemerintahan ;**

Bagian Pemerintahan dikepalai oleh Kepala Bagian Pemerintahan yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kecamatan.

Bagian Pemerintahan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Pemerintahan umum;
- 2) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Kerjasama.

**a.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat;**

Bagian Kesejahteraan Rakyat dikepalai oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan keagamaan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Bina Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- 2) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial; dan
- 3) Sub Bagian Bina Keagamaan dan Budaya;

**a.3 Bagian Hukum;**

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di Bagian Hukum.

Bagian Hukum terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum; dan
- 3) Sub Bagian Bantuan Hukum.

**b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Pariwisata, Perindustrian, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian, BUMD/Perbankan, serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi:

- Dinas Pangan dan Pertanian;
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- Dinas Perhubungan;
- Dinas Pariwisata;
- Dinas PU dan Penataan Ruang;
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- Dinas Komunikasi dan Informatika.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:

**b.1 Bagian Perekonomian;**

Bagian Perekonomian dikepalai oleh Kepala Bagian Perekonomian yang mempunyai tugas merencanakan

operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait koordinasi pembinaan pengembangan potensi dan ekonomi daerah, pengembangan jaringan ekonomi dan pemasaran serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Tenaga Kerja, dan Lingkungan Hidup, serta perbankan dan lembaga keuangan non bank Bagian Perekonomian terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
- 2) Sub Bagian Bina Pengembangan Ekonomi Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Bina Sarana dan Kelembagaan Ekonomi Daerah.

## **b.2 Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan;**

Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan dikepalai oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengadaan barang jasa dan pengendalian pembangunan serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi urusan Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan

3) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan.

### **b.3 Bagian Perencanaan dan Anggaran;**

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan anggaran.

Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Keuangan.

### **c. Asisten Administrasi Umum**

Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan interent, pelayanan barang dan jasa, serta urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi:

- Sekretariat DPRD;
- Inspektorat;
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; dan
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol.

Asisten Administrasi Umum terdiri dari :

#### **c.1 Bagian Organisasi**

mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan program dan kegiatan di bidang organisasi.

Bagian Organisasi terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Kelembagaan;
- 2) Sub Bagian Tata Lakasana;
- 3) Sub Bagian Aparatur dan Kinerja.

### **c.2 Bagian Umum dan Perlengkapan**

Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang umum. Bagian Umum terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum;
- 2) Sub Bagian Perlengkapan dan;
- 3) Sub Bagian Rumah Tangga

### **c.3 Bagian Protokoler**

Bagian Protokoler dan Dokumentasi mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang Protokoler dan Dokumentasi

Bagian Protokoler dan Dokumentasi terdiri diri

- 1) Sub Bagian Protokoler; dan
- 2) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

## **2.2. Sumber daya Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Adapun gambaran kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 2.1. berikut ini :

**Tabel. 2.1.**  
**Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang**  
**Menurut Golongan Tahun 2019**

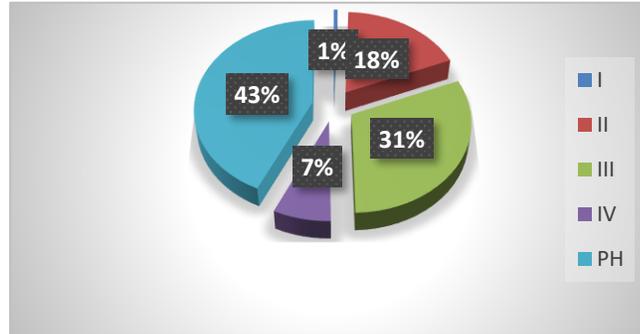
No	Uraian Unit Kerja	Golongan										Jml
		I		II		III		IV		Non PNS		
	Jenis kelamin	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
2	Staf ahli	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3
3	Staf pada staf ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	Asisten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Bagian Pemerintahan	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-	7
6	Bagian Hukum	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	5
7	Bagian Organisasi	-	-	1	-	-	4	-	1	-	-	6
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	2	-	4	3	1	-	4	5	19
9	Bagian Perekonomian	-	-	1	-	3	1	1	-	-	-	6
10	Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan	-	-	5	1	8	3	1	-	-	-	18
11	Bagian Umum dan Perlengkapan	1	-	12	1	3	3	1	-	31	26	78
12	Bagian Perencanaan dan Anggaran	-	-	-	1	3	5	-	1	-	2	12
13	Bagian Protokoler	-	-	5	1	3	6	1	-	4	6	26
	Jumlah	1	0	28	5	29	27	10	3	39	39	181

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2019

Adapun perbandingan jumlah PNS menurut golongan tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

**Grafik 2.1.**

**Jumlah Pegawai menurut Golongan**



*Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2019, diolah.*

Selanjutnya bila dilihat latar belakang pendidikan pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 2.2 di bawah ini :

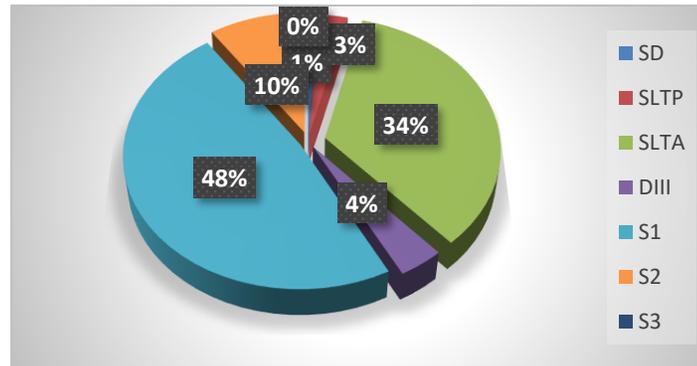
**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang**  
**Menurut Latar Belakang Pendidikan Umum**  
**Tahun 2019**

No	Uraian Unit Kerja	Kualifikasi Pendidikan							Jml
		SD	SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	S3	
1	Sekdako	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Staf ahli	-	-	-	-	1	2	-	3
4	Asisten	-	-	-	-	0	-	-	0
5	Bagian Pemerintahan	-	-	3	1	3	0	-	7
6	Bagian Hukum	-	-	2	-	3	1	-	6
7	Bagian Organisasi	-	-	1	-	4	1	-	6
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	4	-	6	-	-	10
9	Bagian Perekonomian	-	-	1	-	3	2	-	6
10	Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan	-	-	6	1	10	1	-	18
11	Bagian Umum dan Perlengkapan	1	3	11	0	4	2	-	21
12	Bagian Perencanaan dan Anggaran	-	-	2	2	6	-	-	10
13	Bagian Protokoler	-	-	6	0	10			16
	Jumlah	1	3	36	4	50	10	0	104

*Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang, 2018*

Adapun perbandingan jumlah PNS menurut latar belakang pendidikan umum tersebut dapat dilihat dari Grafik 2.2. di bawah ini :

**Grafik 2.2.**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Umum**



*Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2018, data diolah.*

Adapun gambaran umum ketersediaan sarana dan prasarana pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2019**

No. Urut	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Electric Generating Set	3	2	1	
2	Sedan	3	3		
3	Jeep	3	3		
4	Station Wagon	41	34	5	2
5	Bus penumpang	3	1	1	1
6	Truck + Attachment	1		1	
7	Sepeda Motor	55	45	4	6
8	Mesin Ketam	1	1		
9	Mesin Bor	1	1		

10	Mesin Ketik Elektronik	1	1		
11	Lemari Besi/Metal	12	10	1	1
12	Rak Besi/Metal	4	3	1	
13	Filling Besi/Metal	44	30	10	6
14	Band Kas	2	2		
15	Lemari Kaca	7	7		
16	Lemari Makan	2	2		
17	Box Arsip	1	1		
18	Alat Penghancur Kertas	3	3		
19	Papan Nama Instansi	1	1		
20	Papan Pengumuman	7	7		
21	Papan Tulis	1	1		
22	Mesin Absensi	3	3		
23	Meja Biro	25	20	5	
24	Kursi Biro	5	5		
25	Generator Set	3	3		
26	Meja Baca	1	1		
27	Stand Speaker	1	1		
28	Lemari Kayu	32	30	2	
29	Meja Kayu/Rotan	2	2		
30	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	3	3		
31	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	12	10	2	
32	Meja Rapat	31	31		
33	Meja Tulis	1	1		
34	Meja Makan	47	47		
35	Meja Panjang	5	5		
36	Kursi Rapat	8	8		
37	Kursi Tamu	17	17		
38	Kursi Putar	40	40		
39	Kursi Biasa	1	1		
40	Meja Komputer	12	12		
41	Kasur	9	9		
42	Tikar	60	60		
43	Meja 1/2 Biro	96	90	6	
44	Sofa	1	1		
45	Lemari Pakaian	5	4	1	
46	Lemari Rias	2	1	1	

47	Jam Elektronik	1	1		
48	Mesin Penghisap Debu	5	3	1	1
49	Mesin Cuci	5	3	1	1
50	Lemari Es	11	9	1	1
51	AC Sentral	1	1		
52	AC Unit	16	10	6	
53	Kipas Angin	10	10		
54	Alat Dapur	28	25	3	
55	Dispenser	8	7	1	
56	Alat Pemanas	10	9	1	
57	Televisi	22	20	2	
58	Amplifiler	2	2		
59	Wireless	6	6		
60	Microphone	5	4	1	
61	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	1		
62	Camera Video	2	2		
63	Tangga Alumunium	2	2		
64	Kaca Hias	11	11		
65	Mimbar/Podium	2	2		
66	Handy Cam	4	4		
67	DVD (Disk Video Display)	1	1		
68	Gorden	3	3		
69	Pompa Air (Alat Rumah Tangga)	3	3		
70	Tangki Air	2	2		
71	Alat Peadan/Portable	1	1		
72	Internet	3	3		
73	P.C. Unit	53	40	10	3
74	Laptop/Notebook	41	35	5	1
75	Hard Disk	6	6		
76	Power Suply	28	25		3
77	Peralatan Mini Komputer	1	1		
78	Printer/Printer scanner	39	39		
79	Scanner	11	11		
80	Server	3	3		
81	Router	1	1		
82	Hub	1	1		
83	Rak Server	1	1		

84	Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	4	4		
85	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1		
86	Meja Tamu Ruangan Tunggu Menteri/Gub./Bup./Walikota	1	1		
87	Meja Tamu Biasa	13	13		
88	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	4	4		
89	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	3		
90	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1		
91	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	3	3		
92	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3	3		
93	Camera Attachment	12	6		6
94	Loudspeaker	10	10		
95	Proyektor + Attachment	7	5		2
96	Microphone	26	6		20
97	Speaker Ramsa	1	1		
98	Equalizer	1	1		
99	Sound System	8	7		1
100	Headphone	1	1		
101	Microphone/Wireless Mic	2	2		
102	Battery Charger	1	1		
103	Power Amplifier	6	5	1	
104	Handycam	1	1		
105	Camera Digital	1	1		
106	Camera Electonic	4	4		
107	Tripod Camera	4	4		
108	Ligjting Stand Tripod	1	1		
109	Lensa kamera	2	2		
110	Film Sound Recorder	1	1		
111	Mixer PVC	6	5	1	
112	Handy Talky (HT)	23	18		5
113	Faximile	4	4		
114	Alat Olah Raga Lainnya	17	15	1	2

*Sumber : Bagian Umum Setdako Padang Panjang, Oktober 2018*

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi disamping sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah.

Dalam upaya mencapai indikator kinerja pelayanan, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai program kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. Jika ditinjau dari segi urusan, Sekretariat Daerah menyelenggarakan beberapa urusan, antara lain : urusan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian dan urusan pertanahan. Pencapaian Kinerja Pelayanan perangkat daerah dan realisasi Keuangan Dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan 2.4 berikut:



**Tabel 2.3**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah  
Kota Padang Panjang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
				1	Jumlah tanah yang diadakan			3 lokasi	-	-	-	-	2 lokasi	-	-	-	-	67%
2	Jumlah Penyelesaian masalah tanah yang dilaksanakan		4 paket	1 masalah	-	-	-	-	1 masalah	-	-	-	-	50%	100%			
3	Jumlah Batas kelurahan di Kota Padang Panjang		16 kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	-	1 Dokumen	16 kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	-	1 Dokumen	100%	100%	100%			100%
4	Jumlah sekolah sehat yang dibina			TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1 (4 sekolah)	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1 (4 sekolah)	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1 (4 sekolah)	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1 (4 sekolah)	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1 (4 sekolah)	TK : 2 SD : 2 SMP : 2 SMA : 2 (8 sekolah)	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1 (4 sekolah)	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1 (4 sekolah)	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1 (4 sekolah)	200%	100%	100%			100%
5	Jumlah peringatan hari-hari besar Islam			8 HBI	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
6	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi		2 kegiatan	3 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	2 kegiatan	11 kegiatan	6 kegiatan	12 kegiatan	9 kegiatan	100%	367%	120%	240%	180%	
7	Meningkatnya jumlah zakat dan sedekah yang dikumpulkan BAZ		2.8 Milyar	2.8 Milyar	3 Milyar	3 Milyar	Rp. 3.040 Milyar	Rp. 2.822.145.487	Rp.3.4 Milyar	Rp.3.792 Milyar	Rp.3.106 Milyar	Rp. 3.080.722.627	101%	121%	126%	104%	101%	
8	Jumlah Perda yang ditetapkan		8 Perda	8 Perda	8 Perda	8 Perda	8 Perda	10 Perda	13 Perda	11 Perda		5 Perda	125%	163%	138%	0%	63%	
9	Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan		20 Perwako	20 Perwako	15Perwako	15Perwako	15 Perwako	26 Perwako	26 Perwako	50 Perwako	44 Perwako	67 Perwako	130%	130%	333%	293%	447%	
10	Terdokumentasinya dan tersebarluasnya peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah		3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	150%	100%	
11	Penyuluhan Hukum		4 kegiatan	4 kali kegiatan	-	-	-	4 kegiatan	4 kali kegiatan	-	-	-	100%	100%				
12	Laporan RANHAM		2 Laporan	2 Laporan	-	-	-	1 Laporan	0 laporan	-	-	-	50%	0%				
13	Tersedianya dokumen LAKIP dan Penetapan Kinerja, LKPJ dan LPPD		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen	100%	100%	100%	100%	117%	
14	% SKPD yang telah menyampaikan laporan SPM		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Nilai IKM		Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik						
16	Meningkatnya persentase SKPD yang mendapatkan nilai sangat baik dalam evaluasi kinerja		75%	75%	75%	40%	75%	74,38%	62,96%	54,25%	58,33%	54,17%	99%	84%	72%	146%	72%	
17	Terlaksananya koordinasi dan monev penyaluran RASKIN		16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	-	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	-	100%	100%	100%	100%		
18	Terlaksananya Pembinaan dan Monev Perkembangan KPRI		-	26 KPRI	26 KPRI	30 KPRI	30 KPRI	-	26 KPRI	26 KPRI	30 KPRI	30 KPRI		100%	100%	100%	100%	

19	Terlaksannaya kajian lembaga Pengelolaan Pasar			-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-				100%			
20	Terlaksannaya koordinasi kebijakan Pengelolaan			-	-	-	-	1 tahun	-	-	-	-	1 tahun					100%		
21	Terlaksannaya kajian perusahaan daerah				2 kajian	1 BUMD	1 kegiatan			2 kajian	1 BUMD	1 kegiatan	-	100%	100%	100%				
22	Tersusunnya seleksi DirekturBUMD			-	-	-	1 kegiatan	-	-	-	-	1 kegiatan	-				100%			
23	Terlaksannaya fasilitasi dan Pembinaan BUMD			-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali					100%		
24	Terlaksannaya koordinasi pengendalian inflasi daerah			1 rakor	2 rakor dan 1 sosialisasi	3 Monev	3 kali	3 kali	1 rakor	2 rakor dan 1 sosialisasi	3 Monev	3 kali	3 kali	100%	100%	100%	100%	100%		
25	Terlaksannaya Pembinaan dan Monev Sumber Daya			-	-	-	4 kali	-	-	-	-	4 kali	-				100%			
26	Terinventarisir dan Tersosialisasi dengan baik profil Bank dan Lembaga Keuangan non Bank di Kota Padang Panjang			-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan					100%		
27	Terlaksannaya kajian Produksi Pangan dan Konsumsi Pangan Kota Padang Panjang			-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen					100%		
28	Terlaksannaya evaluasi kegiatan pembangunan			-	11 bulan	11 bulan	12 bulan	12 bulan	-	11 bulan	11 bulan	12 bulan	12 bulan				100%	100%	100%	100%
29	Meningkatnya nilai rata-rata evaluasi fisik kegiatan			75%	80%	86%	85%	100%	73,22%	97%	97,82%	99%	97,99%	98%	121%	114%	116%	98%		
30	Meningkatnya pengetahuan PA, KPA, panitia pejabat pengadaan serta PPK pengadaan barang dan jasa Pemerintah			80%	90 orang	90 orang	100%		72%	90 orang	90 orang	100%		90%	100%	100%	100%			
31	Meningkatnya persentase registrasi dan verifikasi proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah oleh LPSE			100%	100%	100%	100%		90%	100%	100%	100%		90%	100%	100%	100%			
32	Meningkatnya persentase jumlah panitia pejabat pengadaan ,PPK dalam mengoperasionalkan LPSE			90%	95%	100%	100%		80%	100%	100%	100%		89%	105%	100%	100%			
33	Terlaksannaya pendidikan/ sosialisasi LPSE, SIRUP dan monev online			-	100%	100%	100%	96 orang	-	100%	100%	100%	96 orang				100%	100%	100%	
34	Meningkatnya Jasa kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi			-	-	-	85%	6 laporan	-	-	-	85%	-				100%	0%		
35	Penyebarluasan informasi kegiatan Pemerintah Daerah melalui Media Massa			35 Media cetak	35 Media cetak	35 Media Cetak	45 Media Cetak	-	44 Media	- 57 Media	49 Media Cetak	45 Media Cetak	-	126%	163%	140%	100%			
				- 8 portal	- 8 portal	8 portal	5 Media online	-	- 8 portal	- 5 portal	8 portal	5 Media online	-	100%	63%	100%	100%			

				- 3 stasiun televisi	- 3 stasiun televisi	3 stasiun televisi	4 Media Elektronik	-	- 3 stasiun televisi	- 2 stasiun televisi	2 stasiun televisi	4 Media Elektronik	-	100%	67%	67%	4/4*100%		
				- 2 radio	- 2 radio	2 radio	-	-	- 2 radio	- 2 radio	2 radio	-	-	100%	100%	100%			
36	Terpublikasinya kegiatan pembangunan kota Padang Panjang			-	-	-	-	1 Dokumen Visual, 1 Dokumen Audio Visual	-	-	-	-	1 Dokumen Visual, 1 Dokumen Audio Visual					100%	
37	Terlaksananya Pelatihan Keprotokolan			-	-	-	-	50 orang	-	-	-	-	50 orang					100%	
38	Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta PPID pembantu (%)			- 27 SKPD	- 27 SKPD	27 SKPD	-		- 27 SKPD	- 27 SKPD	27 SKPD	-		100%	100%	100%			
				- 1 Sekretariat KPU	- 1 Sekretariat KPU	1 Sekretariat KPU	-		- 1 Sekretariat KPU	- 1 Sekretariat KPU	1 Sekretariat KPU	-		100%	100%	100%			
39	Ditetapkannya Daftar Informasi Publik (%)			-	- 15 UPTD	15 UPTD	-		-	- 15 UPTD	15 UPTD	-		100%	100%				
				8 informasi berkala	- 10 informasi berkala	10 informasi berkala	-		8 informasi berkala	- 10 informasi berkala	10 informasi berkala	-		100%	100%	100%			
				8 informasi setiap saat	- 10 informasi setiap saat	10 informasi setiap saat	-		8 informasi setiap saat	- 10 informasi setiap saat	10 informasi setiap saat	-		100%	100%	100%			
		- 2 informasi serta merta	- 2 informasi serta merta	2 informasi serta merta	-		- 2 informasi serta merta	- 2 informasi serta merta	2 informasi serta merta	-		100%	100%	100%					
40	Jumlah kegiatan yang dihadiri Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			100 kegiatan	120 Kegiatan	100 Kegiatan	-	84 kegiatan	112 kegiatan	411 Kegiatan	180 Kegiatan	-	96 kegiatan	112%	343%	180%		114%	
41	Tersusunnya Rencana dan Pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah			-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen					100%	100%

Tabel 2.4  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah  
 Kota Padang Panjang Tahun 2014-2018

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan		
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi	
					3	4	5	6	6	8	9	10	11	11	13	14	15	16	16	17	18	
					67.191.907.777	50.047.434.675	18.884.547.860	27.159.637.498	25.867.121.050	27.022.332.876	35.010.709.407	16.048.606.643	20.370.469.356	20.628.361.266	40.215.045.501	16.056.249.678	2.835.941.017	6.792.493.317	5.219.309.764	38.074.365.952	23.850.558.103	
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara efektif dan efisien	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				9.004.750.875	8.499.900.000	7.822.045.360	10.055.943.200	8.535.973.500	8.067.336.535	7.192.842.511	6.645.392.221	8.622.187.649	6.882.152.763	937.422.340	1.307.057.489	1.176.553.139	1.433.795.551	1.653.620.737	8.783.724.187	7.481.982.336	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dikirim			35.000.000	32.520.000	23.724.000	26.390.000	26.615.000	33.708.000	27.942.000	16.753.000	21.049.100	17.175.000	1.892.000	4.578.000	4.971.000	5.340.900	6.970.000	8.700.000	28.901.800	23.605.420
	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah tagihan kebutuhan telepon, air dan listrik kantor			271.800.000	764.000.000	222.000.000	243.000.000	322.000.000	238.349.700	245.162.455	174.728.375	205.649.154	230.131.805	33.450.300	518.837.545	47.273.628	37.351.646	91.868.195	384.940.000	218.803.696	
	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jasa perlatan dan perlengkapan kantor			240.700.000	205.895.000	222.250.000	337.320.000	401.750.000	204.914.200	163.695.500	164.390.000	255.907.850	239.049.300	35.785.800	42.199.500	57.860.000	81.412.150	162.700.700	291.583.000	205.591.370	
	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara/diperbaiki			1.745.590.000	1.380.650.000	1.908.353.820	1.905.870.000	1.495.655.000	1.348.029.700	1.276.806.999	1.509.479.792	1.698.086.211	1.177.227.184	397.560.300	104.843.001	398.874.028	207.783.789	318.427.816	1.687.223.764	1.401.725.977	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				261.200.000	267.600.000	299.300.000	727.900.000	-	260.391.000	244.710.000	244.125.000	581.375.000	-	10.809.000	22.890.000	55.175.000	146.125.000	-	311.120.000	264.120.200	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor			452.660.000	486.610.000	491.264.500	647.377.200	597.070.000	329.886.500	437.691.000	393.921.303	454.217.932	493.754.995	122.973.500	49.119.000	97.442.197	193.159.298	104.215.005	535.236.340	421.854.346	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	Jasa Perbaikan peralatan gedung kantor			190.000.000	141.500.000	74.000.000	80.000.000	60.000.000	102.409.520	130.383.360	53.518.200	56.884.191	6.495.500	87.590.400	11.116.650	20.481.800	23.115.809	53.614.500	109.100.000	69.836.152	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis yang disediakan			159.102.000	100.000.000	153.750.000	100.000.000	40.000.000	153.403.050	99.857.275	38.151.445	99.813.258	39.587.390	42.725	13.598.555	196.742	412.610	90.170.400	86.182.484		
	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan			224.186.875	208.615.000	174.125.000	132.000.000	90.400.000	164.193.750	158.629.062	102.831.310	77.059.750	49.357.875	59.993.125	49.985.839	71.293.690	54.940.250	41.042.125	105.865.375	110.414.349	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor			91.740.000	120.000.000	70.000.000	75.000.000	25.000.000	83.962.608	119.896.125	26.681.800	59.269.730	24.994.950	7.757.394	3.875	43.318.200	15.730.270	5.050	76.348.000	62.985.042	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peralatan perpustakaan				6.230.000	8.100.000	-	-	-	6.230.000	8.090.000	-	-	-	-	40.000	-	-	-	2.866.000	2.858.000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan minum rapat dan tamu Pemda			2.384.250.000	1.849.360.000	1.114.710.000	1.330.750.000	999.087.500	2.295.830.295	1.554.024.345	1.089.067.754	1.088.350.425	987.307.691	88.419.705	295.335.655	55.642.248	262.399.575	11.779.809	1.535.631.500	1.382.916.102	
	Rapat/Koordinasi/Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi yang diikuti			2.690.000.000	2.787.500.000	3.090.000.000	4.356.500.000	4.365.000.000	2.845.707.114	2.653.434.400	2.785.646.242	3.950.776.048	3.504.919.125	44.292.866	104.065.600	304.353.758	405.723.952	860.080.875	3.451.800.000	3.109.096.586	
	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis/Pertantaran	Jumlah pegawai Honoror			132.300.000	73.350.000	80.468.040	94.236.000	112.236.000	124.500.000	73.350.000	74.100.000	83.750.000	112.161.948	7.800.000	-	6.360.040	498.000	74.052	98.519.008	95.572.390	
	Belanja Peralatan dan Pngobatan KDH/MKDH				120.000.000	104.000.000	-	-	-	86.801.100	-	-	-	-	33.398.900	104.000.000	-	-	-	44.800.000	17.320.220	
	Terwujudnya peningkatan pengelolaan perlengkapan dan persampahan aset secara efektif dan efisien	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				7.887.567.500	4.408.464.600	3.066.423.000	2.414.859.298	6.471.272.000	6.446.566.676	3.579.175.454	2.325.439.697	1.522.470.600	4.862.151.007	1.441.000.824	829.289.136	740.953.303	792.388.698	1.609.120.993	4.949.737.280	3.767.180.689
		Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan			-	550.850.000	-	-	673.650.000	-	513.864.750	-	-	663.207.250	-	36.985.250	-	-	10.442.750	244.900.000	235.414.400
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional			2.324.132.500	300.000.000	1.158.380.000	-	400.000.000	1.767.522.500	278.620.000	1.156.480.000	-	417.640.000	556.610.000	21.380.000	1.900.000	-	2.380.000	840.502.500	724.052.500
		Pengadaan Peralengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah alat-alat rumah tangga			1.410.790.000	72.799.600	32.610.000	1.596.600.000	1.284.945.875	69.150.000	30.264.700	-	1.510.538.739	125.844.125	3.649.600	-	2.345.300	86.061.261	622.559.820	578.979.863	
Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor		Tersedianya sarana dan prasarana kantor			1.208.445.000	424.070.000	8.500.000	196.890.000	987.097.000	1.076.265.000	393.263.000	-	181.035.000	752.396.040	132.180.000	30.807.000	8.500.000	5.565.000	234.699.940	562.942.400	480.592.308	
Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan		Tersedianya sarana dan prasarana Rumah Jabatan			1.610.115.000	1.475.115.000	1.215.658.000	1.281.010.750	1.746.125.000	1.417.717.555	1.207.337.698	784.213.348	813.866.745	1.122.595.732	192.397.445	267.777.302	431.444.854	467.124.005	623.629.268	1.465.604.750	1.069.150.215	
Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas		Tersedianya sarana perumahan bag aparat			76.500.000	80.000.000	46.000.000	52.000.000	45.000.000	56.160.150	74.694.475	1.501.000	44.407.438	1.384.750	20.339.850	5.305.525	44.499.000	7.592.562	43.615.250	59.900.000	35.629.863	
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor		Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor			165.000.000	170.000.000	75.000.000	150.000.000	400.000.000	113.356.400	139.799.353	68.780.100	146.442.500	42.982.412	51.643.800	30.200.647	6.239.900	3.557.500	357.017.588	192.000.000	102.268.153	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		Tersedianya mobil jabatan			526.310.000	476.335.000	426.310.000	555.100.000	384.500.000	401.528.600	291.430.989	290.398.651	318.227.667	247.881.894	124.781.400	194.904.011	175.911.349	236.872.333	116.618.106	469.711.000	299.893.560	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					453.350.000	490.060.000	-	-	265.430.186	357.645.419	-	-	-	187.919.914	132.414.581	-	-	-	-	188.982.000	124.615.121	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan rumah Jabatan/Dinas		Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana			39.625.000	37.875.000	39.425.000	45.045.000	95.800.000	24.414.960	31.599.780	16.347.800	30.835.600	44.822.050	15.210.040	6.275.220	23.077.200	14.209.400	50.877.950	51.554.000	29.624.038	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya sarana gedung kantor			73.400.000	110.600.000	97.150.000	76.300.000	112.500.000	39.325.450	66.404.000	47.738.800	56.270.950	56.809.500	34.074.550	44.196.000	49.411.200	20.029.050	55.680.500	83.990.000	53.309.740	
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor					220.780.000	-	-	-	-	165.396.000	-	-	-	-	-	55.394.000	-	-	-	44.152.000	33.073.200	
Pencertifikasi Tanah Pemerintah Daerah		Tersertifikatnya tanah milik pemerintah			-	-	36.193.549	30.000.000	-	-	-	1.100.000	1.790.640	-	-	-	-	-	35.093.548	28.209.360	13.238.710	578.126
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara efektif dan efisien		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				185.970.000	141.300.000	60.800.000	82.500.000	267.500.000	170.729.250	115.250.000	50.140.000	42.738.150	181.659.150	15.240.750	26.050.000	10.560.000	39.791.850	85.840.950	147.514.000	112.103.310
		Pengadaan Pakain Dinas Beserta Peralengkapannya	Tersedianya pakain Dinas KDH/MKDH dan ASN			175.470.000	121.000.000	60.800.000	82.500.000	267.500.000	160.229.250	115.250.000	50.140.000	42.738.150	181.659.150	15.240.750	5.750.000	10.660.000	39.791.850	85.840.850	141.454.000	110.003.310
		Pengadaan Pakain Kaya Lapangan				10.500.000	20.300.000	-	-	-	10.500.000	-	-	-	-	-	20.300.000	-	-	-	6.160.000	2.100.000

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur					183.242.500	180.000.000	100.000.000	120.000.000	285.000.000	110.306.700	178.800.000	72.900.000	119.800.000	269.265.626	72.935.800	1.200.000	27.100.000	200.000	15.734.374	173.648.500	150.214.465	
	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terkaitnya PHS mengikuti bentuk peraturan perundang-undangan				160.000.000	180.000.000	100.000.000	120.000.000	285.000.000	89.350.000	178.800.000	72.900.000	119.800.000	269.265.626	70.650.000	1.200.000	27.100.000	200.000	15.734.374	169.000.000	146.023.125	
	Pelatihan di Kantor Sendiri					23.242.500					20.956.700				2.285.800	-	-	-	-	-	4.648.500	4.191.340	
	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					8.210.125	25.217.825	-	-	-	4.450.000	-	-	-	-	3.760.125	25.217.825	-	-	-	-	6.655.590	890.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran					873.600	1.920.375	-	-	-	-	-	-	-	-	873.600	1.920.375	-	-	-	-	558.775	-
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran					457.500	960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	457.500	960.000	-	-	-	-	283.500	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					6.879.125	2.909.950	-	-	-	4.450.000	-	-	-	-	2.429.125	2.909.950	-	-	-	-	1.957.815	890.000
	Monitoring dan Evaluasi Aset					19.427.500										19.427.500						3.855.500	-
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					220.305.000	100.020.000	102.825.000	104.560.000	122.050.000	127.779.400	88.857.400	78.644.800	61.717.100	55.933.986	92.525.600	11.162.600	24.180.200	42.842.900	66.116.014	129.952.000	82.586.537	
	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan					56.015.000					46.238.000				9.777.000	-	-	-	-	-	11.203.000	9.247.600	
	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Pembinaan pengalangan kepada LSS Kota Padang Panjang				164.290.000	100.020.000	102.825.000	104.560.000	122.050.000	81.541.400	88.887.400	78.644.800	61.717.100	55.933.986	82.748.600	11.162.600	24.180.200	42.842.900	66.116.014	118.749.000	73.338.937	
	Terwujudnya Penyusunan Kebijakan dan Peningkatan terb administrasi, pengendalian dan koordinasi dalam Pembinaan pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan efisien	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				230.975.250	224.195.000	199.990.000	248.310.000	231.881.100	158.929.850	195.564.550	187.024.625	234.584.815	191.652.395	72.045.400	28.630.450	12.965.375	13.725.184	40.228.705	227.070.270	193.551.247	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Kolaborasi Perfunggawaban (LKPJ) Tahun 2012	Tersedia Buku LKPJ Walikota				125.763.750	85.525.000	72.382.000	103.500.000	27.350.000	96.058.600	74.678.650	71.804.850	94.583.100	24.367.600	29.704.150	10.846.350	587.150	8.916.900	2.982.400	82.906.150	72.298.760	
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPD) Tahun Anggaran 2008-2013	Tersedia Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				105.211.500	42.875.000	97.423.000	81.000.000	54.775.000	62.870.250	34.557.100	90.149.775	79.441.641	47.803.600	42.341.250	8.317.900	7.273.225	1.558.359	6.971.400	76.256.900	62.964.473	
	Penyusunan Buku LKPJ Walikota Lima Tahunan ( 2008-2013)	Tersedia LKPJ AMJ Walikota								54.750.000					49.063.520	-	-	-	-	5.688.480	10.950.000	8.812.704	
	Pembuatan Buku Memori Walikota 2008-2013	Tersedia Buku Memori Walikota								34.900.000					17.288.400	-	-	-	-	17.611.600	6.980.000	3.457.680	
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPD) Tahun Anggaran	Tersedia Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lima								25.775.000					19.730.500	-	-	-	-	6.044.500	5.155.000	3.946.100	
	Rapel Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Tersedia Evaluasi Kegiatan Pembangunan				33.120.000	30.175.000	63.810.000	34.331.100	-	26.534.200	25.070.000	60.580.075	33.398.775	-	6.585.800	5.105.000	3.249.825	932.325	32.287.220	29.112.610		
	Pendidikan dan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah					62.675.000					59.794.600				2.880.400						12.535.000	11.958.920	
	Terselenggaranya usun pemerintahan umum secara efektif dan efisien	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				42.392.401.777	26.329.530.000	33.800.000	-	-	6.663.911.500	15.150.179.160	33.161.100	-	-	35.728.450.277	11.179.350.840	638.900	-	-	13.751.146.355	4.369.450.352	
	Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					42.292.901.777	26.329.530.000	33.800.000			6.662.131.500	15.150.179.160	33.161.100			35.590.770.277	11.179.350.840	638.900	-	-	13.723.246.355	4.369.094.352	
	Penyelesaian Tanah TNJ					139.500.000					1.780.000				137.720.000	-	-	-	-	-	27.900.000	356.000	

	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Perumahan					14.825.000	135.950.000				854.000	25.300.775					13.961.000	100.649.225							28.355.000	5.432.955	
	Penyelesaian Masalah Perumahan di Kota Padang Panjang					14.825.000	135.950.000				854.000	25.300.775					13.961.000	100.649.225							28.355.000	5.432.955	
Tersebutnya kegiatan pembinaan masyarakat, pendidikan, penguatan organisasi, dan kegiatan social keagamaan serta program Kota Padang Panjang sebagai Kota Ramah Muslim	Program Pemberdayaan Masyarakat Kemasyarakatan					2.662.433.000	5.352.145.000	2.929.295.000	8.964.457.500	7.190.795.000	2.116.695.500	4.371.068.400	2.771.791.200	5.303.357.414	6.404.791.820	565.737.500	961.080.600	154.473.700	3.361.130.026	755.953.180	5.357.223.300	4.193.040.999					
	Pelaksanaan Puncak Ramadhan Kota Padang Panjang					280.560.500	301.605.000	387.665.000	340.845.000	241.245.000	240.042.500			279.845.000	153.911.000	39.318.500	61.562.500		107.820.000	186.634.000	262.135.100	183.008.700					
	Bimbingan dan Pelatihan Pengabdian Masyarakat					78.517.000			71.375.000			24.805.900			16.719.000		3.771.100			4.656.000	9.990.400	8.354.980					
	Adaptasi, Pelatihan dan Sosialisasi Ustaz FKIP/PTSD					79.912.800	47.575.000	139.875.000	101.390.000			75.914.600	39.743.000	101.790.600	78.656.250		3.998.000	7.631.600	37.176.400	22.683.750	73.562.500	69.272.570					
	Pelaksanaan Pondok Al-Qur'an					227.145.000			159.445.400			159.445.400			67.299.600					45.429.000	31.969.980						
	Pelatihan dan Sosialisasi Guru IPA					197.240.000			94.848.600			94.848.600			102.390.400					38.448.000	21.969.820						
	Peningkatan Tim Kesehatan							37.600.000	21.800.000	64.500.000	129.431.900	85.366.000	29.527.000	69.049.200	63.795.000	13.918.100	4.399.000	8.076.900	3.704.800	750.000	81.605.000	75.437.320					
	Bantuan Kesejahteraan Guru FKIP/PTSD, Pahlawan					1.477.275.000	1.886.287.500	1.742.012.500	3.055.810.000	4.777.875.000	1.212.100.000	1.772.722.200	1.697.470.000	2.790.077.000	4.645.612.500	265.175.000	113.565.200	44.842.500	298.733.000	121.942.500	2.588.282.000	2.423.986.200					
	Fasilitas Kelembagaan dan Peningkatan Hal Kota Padang Panjang					96.400.000	103.900.000	109.087.500	81.300.000	109.000.000	77.494.000	90.885.300	87.571.300	61.563.000	99.332.100	18.916.000	13.014.700	10.616.200	18.747.000	9.667.900	99.737.500	85.365.140					
	Pembinaan Tahfidh Al-Qur'an dan Mubaligh Al-Qur'an bagi Siswa					88.827.500	91.170.000	114.320.000	108.787.500	91.100.000	82.298.400	87.875.500	95.948.500	102.640.500	43.249.200	6.668.100	3.294.500	18.271.500	47.880.800	98.841.000	58.041.000	82.394.420					
	Pembinaan dan Pelatihan Tahfidh dan Mubaligh Al-Qur'an bagi Siswa								227.790.000						134.800.200					93.289.800	45.558.000	26.900.040					
	Pembinaan dan Pelatihan Tahfidh dan Mubaligh Al-Qur'an bagi Siswa						31.338.000					24.298.000			7.060.000					6.297.700	4.057.700						
	Pelatihan Manajemen Pendidikan Mengajar dan Penelitian					287.255.000						127.174.600								120.080.400		51.451.000					27.434.920
	Monev dan Evaluasi Bantuan Rehab					15.872.500		19.945.000	14.200.000					16.830.000	7.130.500					19.873.500	7.069.000	9.803.700	4.782.100				
Peningkatan MKG Tingkat Kota Padang Panjang					429.500.000	435.200.000		454.650.000			323.469.000	402.137.200		412.230.400		106.021.000	33.062.800		32.419.900	265.010.000	231.667.320						
Musyawarah MKG Tingkat Kabupaten					1.210.471.500		1.181.170.000				864.740.100	713.395.000				345.677.400			447.776.000		316.627.020						
Peningkatan Masyarakat MKG					495.762.500		652.600.000				430.459.000	558.554.000				68.303.100			195.745.200	269.872.500	217.452.540						
Peningkatan Masyarakat MKG					171.838.000	289.475.000	91.425.000	181.700.000	119.481.200	175.949.800	75.490.300	93.722.000	137.027.000	62.153.800	113.626.200	18.934.700	28.908.000	23.873.000		167.375.000	120.496.980						
Peningkatan Masyarakat MKG					39.390.000		168.600.000	68.390.000			36.375.000	109.177.000		53.090.000		2.875.000			59.423.000	16.290.000	55.660.000	39.728.400					
Peningkatan Masyarakat MKG						330.045.000	790.720.000	279.700.000			333.907.000	204.417.671	167.499.200				16.138.000		97.307.329	82.200.000	185.294.000	145.164.774					
Pembinaan Lembaga Keagamaan, Pondok Pesantren, Peningkatan Kelembagaan							58.790.000							19.724.000					38.526.000		11.690.000	3.944.800					
Pembinaan Lembaga Keagamaan, Pondok Pesantren, Peningkatan Kelembagaan							51.565.000	437.600.000						61.907.200	261.279.470				18.632.800	66.390.320	103.820.000	62.629.334					
Peningkatan Masjid						2.056.720.000					23.360.900								2.633.399.491		411.344.000	4.672.101					
Program Peningkatan dan Pemeliharaan SDA dan							20.140.000							16.514.825					3.325.175	4.609.000	3.367.968						
Peningkatan dan Pemeliharaan SDA dan							20.140.000							16.514.825					3.325.175	4.609.000	3.367.968						
Program Penyuluhan dan Pemeliharaan Dokumen/Keper																											
Digitalisasi Arsip																											
Tersebutnya upaya pemertahanan umum secara lokal dan						645.306.000	743.251.000	343.248.000	630.360.000	726.626.800	505.957.280	579.613.175	274.866.300	470.080.891	493.504.664	142.428.725	160.637.825	73.379.700	150.179.109	196.624.136	104.043.965	457.350.062					
Program Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kepada Daerah/Wakil Kepala Daerah						327.165.000	453.150.000	86.000.000			303.238.155	330.616.825	60.701.200		24.125.845		123.133.173	5.288.800			178.263.000	144.781.436					
Peningkatan Operasional Pahlawan						62.998.000	52.196.000	42.746.000	63.000.000	77.800.000	39.900.000	61.744.000	40.077.000	58.749.000	37.200.000	23.496.000	452.000	2.669.000	4.252.000	40.600.000	59.747.600	45.483.800					
Peningkatan Operasional Pahlawan						94.150.000	57.475.000	40.850.000	776.500.000	136.781.800	43.379.200	23.804.950	28.566.900	107.540.750	106.958.850	80.778.800	23.670.050	2.233.100	68.569.280	29.862.960	101.127.280	66.048.320					
Peningkatan Kelembagaan						35.800.000	21.800.000	28.600.000	15.400.000	61.430.000	22.704.600	21.800.000	12.683.400	5.400.000	15.753.000	12.796.500		13.916.600	10.000.000	25.647.000	30.800.000	15.628.180					
Peningkatan Kelembagaan						114.375.000	110.975.000	92.275.000	117.710.000	120.180.000	85.278.425	101.362.400	41.927.800	99.280.400	78.235.000	29.149.675	6.612.600	49.302.200	18.429.600	41.950.000	111.075.000	81.605.205					
Peningkatan Kelembagaan						14.200.000	14.450.000	28.420.000	12.118.000	15.588.000	12.118.000	15.588.000	12.118.000	15.588.000	12.118.000	15.588.000	12.118.000	15.588.000	12.118.000	15.588.000	12.118.000	15.588.000					
Optimalisasi Peningkatan						39.500.000	30.500.000	49.875.000	161.690.000	142.690.000	30.900.000	48.915.000	80.600.000	111.050.000			960.000		21.090.000	31.600.000	64.935.000	54.213.000					
Peningkatan Kelembagaan								156.000.000						118.511.741					37.488.259	8.546.580	50.710.000	41.563.031					
Peningkatan Kelembagaan								73.550.000						118.511.741						36.318.000	14.710.000	31.140.748					
Tersebutnya produk hukum daerah yang sesuai dan						775.109.000	929.112.500	1.290.907.500	1.031.225.000	702.490.000	327.146.850	641.227.502	950.961.494	545.000.989	363.018.224	407.596.250	287.884.578	295.246.006	495.134.011	429.471.375	347.768.000	595.429.056					
Peningkatan Kelembagaan						34.100.000	30.867.000				33.700.000	30.812.500				450.000			13.907.500	12.967.500							
Peningkatan Kelembagaan						46.750.000	24.172.500				20.215.000	16.892.750				26.540.000			7.216.750		14.720.500	7.420.750					
Peningkatan Kelembagaan						150.425.000	310.920.000	610.020.000	477.500.000	448.690.000	36.700.000	212.960.000	519.748.700	262.001.289	129.890.837	97.670.000	90.271.300	215.498.711	318.789.163	399.429.000	232.296.166						
Peningkatan Kelembagaan						277.360.000	348.896.000	540.950.000	441.425.000	149.630.000	97.804.600	229.894.287	361.010.327	222.129.700	116.917.310	180.045.600	119.380.603	178.939.673	219.495.300	32.462.900	351.804.000	205.511.247					

	Pembuatan Berita Daerah	Penyebarluasan Peraturan Kota Padang Panjang			47.800.000	39.975.000	99.937.500	92.100.000	131.000.000	42.253.750	33.478.125	74.902.467	60.960.000	91.142.277	5.546.250	6.496.675	25.035.033	31.140.000	39.857.723	82.162.500	60.547.324
	Penyelesaian Masalah Hukum bagi Masyarakat	Tersedianya Biaya Perkara bagi masyarakat pencari keadilan selama satu tahun			41.400.000	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	41.400.000	-	-	20.000.000	20.000.000	16.280.000	-
	Penguluhan Hukum dan Sosialisasi Peraturan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Perda kepada Masyarakat			60.910.000	53.410.000	-	-	37.360.000	48.144.500	43.993.900	-	-	24.754.200	12.765.500	9.416.100	-	-	12.805.800	30.336.000	23.378.520
	Talk Show dan Dialog Interaktif tentang HAM di Media Elektronik				-	42.150.000	-	-	-	26.540.000	-	-	-	-	-	15.610.000	-	-	-	8.430.000	5.308.000
	Pelatihan HAM kepada Siswa Tingkat SLTA se Kota Padang				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelatihan Legal Drafting				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum				32.270.000	37.107.500	-	-	-	26.566.450	34.583.900	-	-	-	5.703.550	2.523.600	-	-	-	13.875.500	12.230.070
	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAN/HAM	Terlaksananya Rencana Aksi Nasional HAM di Kota Padang Panjang			27.025.000	12.850.000	-	-	5.850.000	10.472.500	-	-	-	313.600	16.552.500	12.850.000	-	-	5.536.400	9.145.000	2.157.220
	Diseminasi Hukum bagi Aparatur Kota Padang Panjang				-	29.295.000	-	-	-	-	12.381.350	-	-	-	-	16.823.650	-	-	-	5.841.000	2.476.270
	Pelatihan HAM kepada Guru Pendidikan Kewarganegaraan se Kota Padang Panjang				16.425.000	-	-	-	-	11.194.950	-	-	-	-	5.230.050	-	-	-	-	3.285.000	2.238.990
Terselenggaranya usulan pemerintahan umum secara efektif dan efisien	Program Penataan Daerah Otonomi Baru				45.950.000	235.010.000	207.225.000	61.500.000	108.400.000	-	139.500.875	175.357.725	57.013.200	15.152.000	45.950.000	95.409.125	31.867.275	4.586.800	93.248.000	131.837.000	77.424.750
	Facilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas				48.950.000	20.250.000	-	-	-	-	11.533.700	-	-	-	48.950.000	8.716.300	-	-	-	13.440.000	2.308.740
	Penataan dan Penetapan Batas Antar Kelurahan Kota Padang Panjang	Terlaksananya penataan kelurahan di Kota Padang Panjang			-	117.660.000	109.625.000	-	81.200.000	-	112.678.000	107.573.525	-	-	-	4.982.000	2.351.475	-	81.200.000	61.757.000	44.050.305
	Pemetaan Nama-nama Rupa Bumi Unsur Buaran				-	21.750.000	-	-	-	-	12.844.975	-	-	-	-	8.905.025	-	-	-	4.350.000	2.568.995
	Facilitasi Pengalihan Ususan Pemerintahan Konkuren				-	75.350.000	32.000.000	-	-	-	2.544.200	27.074.700	-	-	-	72.895.800	4.925.300	-	-	21.470.000	5.923.780
	Peregasan Batas Antar Daerah Kota Padang Panjang	Terlaksananya penataan Batas Wilayah Administrasi Kota Padang Panjang			-	-	65.300.000	81.800.000	27.200.000	-	-	40.708.500	57.013.200	15.152.000	-	-	24.590.500	4.586.800	12.048.000	30.820.000	22.574.940
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pemberdayaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan				-	73.975.500	-	-	-	-	47.518.050	-	-	-	-	26.497.450	-	-	-	14.795.100	9.503.610
	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan				-	20.578.000	-	-	-	-	17.251.200	-	-	-	-	3.326.800	-	-	-	4.115.600	3.450.240
	Penyelenggaraan Bimtek Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan				-	39.017.500	-	-	-	-	17.650.325	-	-	-	-	21.367.175	-	-	-	7.803.500	3.530.065
	Sosialisasi Percepatan Pembangunan dan				-	14.380.000	-	-	-	-	12.616.525	-	-	-	-	1.763.475	-	-	-	2.876.000	2.523.305
Terwujudnya peningkatan kualitas SDM dan peningkatan disiplin, etos kerja dan kesiapsahaan aparatur yang sesuai dengan kebutuhan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				15.970.000	-	-	-	-	12.572.100	-	-	-	-	3.397.900	-	-	-	-	3.194.000	2.514.420
	Forum Komunikasi Keorganisasian Propinsi dan Kabupaten Kota Se Sumatera				15.970.000	-	-	-	-	12.572.100	-	-	-	-	3.397.900	-	-	-	-	3.194.000	2.514.420

Terwujudnya Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Kelembagaan Pemerintah Daerah secara Efektif dan Efisien	Program Penataan Kelembagaan dan Penataan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Pelaksanaan laporan No 5 Tahun Revisi DOK/Facilitasi Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Maksimum ISFM			57.626.000	498.374.500	175.087.500	247.937.500	195.955.000	46.705.950	235.363.200	155.222.325	419.445.142	73.266.070	10.920.050	263.011.300	19.865.175	(171.507.642)	32.688.930	216.996.100	186.000.537	
				25.825.000	161.585.000	86.187.500			24.343.950		73.435.600			1.861.060					5.185.000	4.680.790	
				31.701.000	25.349.000	15.025.000	20.067.500	9.905.000	22.362.000	17.858.100	14.876.200	11.783.000		9.339.000	7.490.900	148.800	8.224.500	9.905.000	20.397.500	13.375.860	
					38.100.000	54.650.000				48.307.000	81.725.600				38.100.000	2.924.400			18.650.000	10.245.100	
					63.020.500										14.723.500				12.936.100	9.641.480	
					66.320.000	19.215.000		40.380.000	39.055.500	16.194.925			27.696.400		17.264.500	4.030.075			12.933.600	23.177.000	16.387.365
					153.990.000			46.600.000	130.142.600				38.648.170		23.847.400				7.960.630	40.118.000	33.758.354
								6.190.000				203.831.071	6.820.500					(203.831.071)	2.178.500	1.620.000	42.150.314
						227.930.000						203.831.071						24.689.929		49.986.000	40.768.214
Terwujudnya Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Produksi Daerah dan Peningkatan Kesejahteraan	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah			189.508.250	309.833.000	98.486.000	357.750.000	229.000.000	68.208.750	182.540.450	93.320.248	244.242.473	172.196.149	121.299.500	127.192.510	5.165.752	113.507.527	56.803.851	236.915.450	152.121.622	
				43.844.000	27.402.500	15.800.000	37.500.000	55.150.000	35.917.000	25.543.250	14.607.781	25.808.925	49.396.192	8.327.000	1.859.250	892.219	11.690.075	5.750.808	35.679.200	30.175.430	
				35.479.250	33.525.500	28.601.000	38.850.000		32.691.750	32.875.740	28.076.904	34.768.600		2.787.500	649.760	524.096	4.061.400		27.291.150	25.682.599	
				110.185.000										110.185.000					22.637.000		
					128.385.000					118.536.500					9.840.500				25.677.000	23.707.300	
					120.520.000	54.385.000	114.600.000	32.000.000	5.685.000	50.635.563	50.849.000	21.125.626		114.035.000	3.749.437	63.651.000	10.874.474	64.301.000	25.679.018		
								56.650.000				56.113.775				736.225		11.370.000	11.222.795		
								85.000.000				45.587.658				39.442.244		17.800.000	9.111.521		
							168.800.000					132.714.948				34.085.082		33.380.000	26.542.990		
Terwujudnya Perumusan Kebijakan Publikasi dan Jasa Pemenuhan	Program Pemenuhan Perangkat Lunak dan Jasa Pemenuhan			422.020.000	973.422.500	543.077.500	419.397.500	300.650.150	268.433.883	569.403.150	456.353.069	227.564.742	247.033.332	153.586.117	104.019.350	67.324.431	191.712.758	17.755.454	459.638.530	348.758.990	
				108.055.000	56.950.000	45.887.500	52.545.000	18.531.150	77.748.775	45.152.150	39.047.175	49.056.050	11.130.300	30.308.225	11.797.850	6.840.125	4.508.950	7.404.850	56.398.530	44.226.890	
				80.875.000	85.410.000	47.450.000	47.850.000	85.640.000	30.380.150	72.638.600	48.686.650	44.942.075	58.296.950	20.454.850	12.571.400	1.963.300	3.807.825	2.373.050	58.445.000	50.294.885	
				177.360.000	414.135.000	383.300.000	287.800.000	180.600.000	90.553.508	356.220.500	314.147.930	105.996.517	152.522.406	86.806.492	57.914.500	69.152.070	181.803.483	7.917.584	294.618.000	203.888.172	
					40.700.000	12.770.000	21.162.500			33.446.000	6.423.000	29.990.100			7.254.000	3.346.200	1.692.400		16.630.000	14.491.980	
				56.005.000	35.597.500				59.778.125	33.387.000				5.228.875	2.200.500				16.320.500	16.835.025	
				29.725.000					18.963.325					15.761.675					5.945.000	3.792.665	
				40.630.000					28.348.900					12.281.100					8.126.000	5.689.790	
					54.270.000						47.847.514				6.422.495				10.854.000	9.569.503	
								46.575.000			47.847.514		15.528.050		(47.847.514)		31.046.950	9.315.000	12.675.113		
								14.400.000				9.585.626					4.814.374	2.880.000	1.917.125		
Terwujudnya Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Kelembagaan Pemerintah Daerah secara Efektif dan Efisien	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi			428.253.500	235.212.500	134.050.000	155.587.500	94.362.500	301.231.500	212.747.125	121.520.825	137.344.400	76.633.230	127.021.900	23.465.375	12.529.175	18.243.100	17.729.270	209.693.200	169.895.436	
				69.670.000	69.650.000	49.600.000	49.912.500	47.437.500	59.028.100	79.255.525	47.516.200	49.532.500	42.087.730	10.846.900	8.444.475	3.083.800	80.000	59.319.710	58.035.000	53.468.071	
				240.670.000	97.665.000	56.450.000	65.275.000	21.180.000	148.993.100	65.630.400	51.098.500	70.548.900	12.152.900	92.576.900	12.024.000	5.441.500	14.734.200	9.987.500	100.240.000	73.465.960	
				25.850.000	23.728.000			25.628.800	22.098.000				223.200	1.629.000				9.915.000	9.544.580		



## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang**

Sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah, maka Sekretariat Daerah memiliki peran sangat penting dalam keberlangsungan pembangunan di Kota Padang Panjang. Kondisi tersebut dapat menjadikan tantangan dan memberi peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah. Berdasarkan Visi dan Misi Kota Padang Panjang, bentuk tantangan pelayanan dan Peluang Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

### **Tantangan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang**

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, berupaya mewujudkan Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, kebutuhan masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan public dan akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri
5. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, berupa upaya meningkatkan kinerja kebijakan SDA/LH, meningkatkan pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam, kebijakan pembiayaan pembangunan,

mengembangkan ekonomi, membina BUMD serta mewujudkan kehidupan manusia yang Islami.

**Peluang Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang**

1. Adanya peraturan perundang-undangan
2. Terciptanya koordinasi dan hubungan yang baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Stake Holder
3. Adanya peluang peningkatan kapasitas pegawai
4. Tersedianya Anggaran

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali analisis isu-isu strategis ini dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2018-2023

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dimaksud, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

Penyusunan kebijakan belum begitu optimal. Tak jarang kebijakan justru muncul di lembaga teknis sementara kedudukan lembaga teknis sejatinya adalah sebagai pelaksana kebijakan. Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman atau beda pemahaman antara Sekretariat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD dengan Sekretariat Daerah.
- c. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 = 2.996/Tinggi
- d. Akuntabilitas Kinerja Kota Tahun 2017 sebesar 54,17 katagori CC, Pada tahun 2018 meningkat kurang signifikan dengan nilai 58,69 / katagori CC.
- e. Belum optimalnya pelaksanaan pendataan Rupa Bumi Buatan di Kota Padang Panjang.
- f. Belum Maksimalnya evaluasi produk hukum daerah
- g. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat.
- h. Belum Optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Seiring dengan telah berakhirnya periode jabatan Walikota dan Wakil Walikota periode 2013-2018, Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah melakukan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah menyiapkan RPJM Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta program Kepala Daerah, dimana penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD Provinsi serta RPJM Nasional. RPJMD tersebut memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun Visi dan Misi Pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah sebagai berikut:

### 3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum tentang apa yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Maka yang menjadi Visi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

#### **“UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT”**

Berikut ini penjabaran dari visi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang tersebut :

**Untuk Kejayaan Padang Panjang** memiliki arti menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakain bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.*;

**Bermarwah** memiliki arti kemuliaan dan kewibawaan. Sehingga, dengan visi “Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Bermarwah” diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakat. Pimpinan dan rakyat Kota Padang Panjang terus bergerak bersama, pemerintahnya menjunjung amanah membangun negeri, rakyat berpartisipasi membela negeri lewat berbagai karya nyata, Bersama-sama dalam semangat penuh cinta dan saling jaga menjaga kebanggaan yang positif pada kotanya Padang Panjang Kota Serambi Mekkah;

**Bermartabat** diartikan sebagai harkat atau harga diri, kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinannya, berangkat dari akar budaya minang “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” dalam arti seluas-luasnya tanpa mengabaikan pluralitas budaya yang ada disekitar kita. Kota yang bermartabat dapat diwujudkan melalui

Kota yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Padang Panjang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan- perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga Kota Padang Panjang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi diberbagai bidang.

### **3.2.2. Misi**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kota Padang Panjang dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi utama yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
2. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang responsive, Inovatif dan Partisipatif

### **3.3. Telaahan Renstra Propinsi**

Penelaahan Dokumen perencanaan Renstra Sekretariat Daerah dengan Renstra Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 bertujuan untuk menyelaraskan dan dapat

memberikan dukungan pencapaian Visi, Misi Propinsi. Adapun Visi dari Gubernur Sumatera barat adalah:

“ Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera. Dari Visi ini ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais dan budaya berdasarkan filosofi falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional, global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dari Visi dan Misi Propinsi di atas selaras dengan Vsi, Misi Walikota Panjang Panjang yang menjadi capaian Renstra Sekretariat Daerah.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah adalah fungsi koordinasi dan fasilitasi terhadap Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Sehubungan dengan hal tersebut di atas sebagai fungsi kordinasi ada Program yang berhubungan dengan tataruang yaitu Penataan Daerah Otonomi Baru.

### **3.5. Isu-Isu Strategis**

Dalam perumusan isu-isu strategis diperlukan sebuah kajian dan analisis untuk dapat mengidentifikasi Kekuatan, Kelemahan dan Peluang serta Tantangan yang ada, Pendekatan yang lazim dilakukan dalam analisis Isu Strategis adalah Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity and Threat). sebuah analisis yang membagi dua analisis yakni analisis terhadap lingkungan internal berupa kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses) serta melakukan analisis terhadap lingkungan eksternal berupa peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Dengan pendekatan tersebut pada yang menjadi Isu strategis Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dapat sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerapan Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Sekretariat Daerah.
2. Tingkatkan Motivasi Kerja dan Disiplin Pegawai dengan memanfaatkan Program Peningkatan Kapasitas Pegawai.
3. Optimalisasi komunikasi, koordinasi dan sosialisasi tentang Kewenangan Setdako
4. Tingkatkan pembinaan aparatur dalam memahami tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas untuk menghindari ego sektoral.
5. Optimalkan komunikasi dan koordinasi dalam peningkatan kapasitas pegawai dalam motivasi dan disiplin pegawai.
6. Optimalisasi capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Optimalisasi pelaksanaan pendataan Rupa Bumi Buatan di Kota Padang Panjang
8. Peningkatan evaluasi produk hukum daerah.
9. Meningkatkan Evaluasi tentang Peraturan-Peraturan yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat
10. Optimalisasi penataan kelembagaan perangkat daerah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Sesuai dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD yakni “ **UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT**, maka dengan potensi, peluang, tantangan dan tugas pokok Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dirumuskan Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang selama 5 (lima tahun) ke depan sebagai mana Tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Sasaran Kinerja Sasaran Pada Tahun ke				
			2019	2020	2021	2022	2023
<b>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintah</b>		<b>Predikat sistim akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</b>	B (60,1)	BB (65)	BB (70,1)	BB (75)	A (80,02)
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sakip	B (60,1)	BB (65)	BB (70,1)	BB (75)	A (80,02)
		Nilai LKPPD	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
<b>Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani</b>		<b>Indek Kepuasan Masyarakat</b>	78 (baik)	79 (baik)	80 (baik)	81 (baik)	82 (baik)
	Meningkatnya Pelayanan Publik	Standar Pelayanan Minimal	84,67	86,33	87,83	89,67	92,50
<b>Meningkatnya aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat</b>		<b>Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid</b>	38,82	56,58	74,34	90,79	100
	Meningkatkan aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat	<b>Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid</b>	38,82	56,58	74,34	90,79	100
<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian dan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase Keberhasilan Terselenggaranya Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan</b>	70,00	77,50	80,00	85,00	87,50
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang	70	80	85	90	90
	Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah	Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan	70	75	75	80	85

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH**  
**KOTA PADANG PANJANG**

Secara spesifik, kebijakan dapat diartikan sebagai pedoman pelaksanaan, berisikan tindakan-tindakan tertentu, sehingga kebijakan tersebut dapat berupa kumpulan keputusan yang mempunyai sifat-sifat :

1. Berupa pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.
2. Menentukan secara teliti bagaimana strategi akan dilaksanakan
3. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.
4. mengarah kepada kondisi-kondisi dimana para pelaksana yang akan melaksanakan mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Berkenaan dengan itu, maka kebijakan Sekretariat Daerah merupakan arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian, maka menurut targetnya, kebijakan Sekretariat Daerah terdiri dari kebijakan internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan yang diakomodir dan dilaksanakan oleh Bagian-Bagian sesuai dengan Tupoksi masing-masing. Sedangkan kebijakan eksternal pada umumnya kebijakan yang diterbitkan dan diarahkan oleh Sekretariat Daerah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan SOPD dan masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan yang telah dirumuskan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk strategi yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Oleh karena itu, strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana Strategis yang efektif , sehingga elemen Strategi pada dasarnya meliputi :

- upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran;

- Sebagai hasil tindak lanjut perumusan faktor kunci keberhasilan, misi dan visi organisasi, yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan, program dan kegiatan;
- harus mampu untuk memberikan arah dan dorongan kepada pelaksana kegiatan; dan
- dapat memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran.

Berkaitan dengan itu, maka strategi dalam Renstra ini merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana Tabel 5.1

TABEL 5.1			
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN			
<b>Visi</b>	<b>: UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT</b>		
<b>Misi: 2. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan Berbudaya</b>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat	Persentase aktivitas Kegiatan keagamaan dimesjid	Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai nilai Agama, adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat melalui gerakan "Gelora Serambi Mekkah"	Peningkatan Pembinaan pada aktifitas keagamaan, sosial dan budaya
<b>Misi : 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif</b>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani	Meningkatnya Pelayanan Publik	Pengembangan inovasi dalam penyelesaian pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan masukan penyempurnaan kebijakan sektor Perekonomian yang tercantum dalam RPJMD</li> <li>2. Mendorong OPD terkait untuk menyelenggarakan kebijakan sektor perekonomian sesuai dengan Renstra, Renja dan jadwal yang sudah ditetapkan</li> <li>3. Mengawal agar kebijakan sektor perekonomian yang sudah ditetapkan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan perencanaan program koordinasi perekonomian daerah</li> <li>2. Membentuk Tim Koordinasi Kebijakan Perekonomian Kota Padang Panjang</li> <li>3. Menyelenggarakan Rapat-Rapat Koordinasi dengan OPD yang terkait dengan Sektor Perekonomian secara berkala</li> <li>4. Medorong penguatan ketersediaan data sektor perekonomian</li> <li>5. Melaksanakan monitoring lapangan secara rutin terhadap seluruh objek kebijakan ekonomi</li> <li>6. Mengkoordinasikan Pengendalian Inflasi Daerah</li> <li>7. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan KPRI Kota Padang Panjang</li> </ol>
	Meningkatnya kualitas kebijakan pencapaian pembangunan daerah	Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan Perundang undangan	Koordinasi, Fasilitasi, Evaluasi Kegiatan pembangunan daerah

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih telah dirumuskan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang ingin dicapai, maka disusun Program kerja Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk lima tahun kedepan. Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode 2018-2023. Berdasar rumusan Tujuan, Sasaran yang telah dirumuskan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dijabarkan menjadi Program kegiatan. Program Kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan adalah sebagai Tabel 6.1

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja/Tujuan, sasaran, Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan				Predikat sistim akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		B (60,1)		BB (65)		BB (70,1)		BB (75)		A (80,02)		A (80,02)	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				Nilai Sakip		B (60,1)		BB (65)		BB (70,1)		BB (75)		A (80,02)		A (80,02)	
				Nilai LKPPD		Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	
	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran		90%	7.279.092.000	90%	5.988.570.400	90%	6.304.892.000	90%	6.304.892.000	90%	6.304.892.000	0,9	32.182.338.400
			Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat		250 lbr Perangko, 3000 lbr materai 6000, 2500 lbr Materai 3000	27.000.000										27.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan		1 Tahun	324.000.000	0	-	0	0	0	-	0	-	0	324.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara		Roda 6 4 unit, Roda 4 28, Roda 2 48 Uni, 22 orang Sopir	1.832.432.000	80 Unit	1.740.810.400	80 Unit	1.832.432.000	80 Unit	1.832.432.000	80 Unit	1.832.432.000	80 Unit	9.070.538.400
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan		2 unit	358.675.000	2 unit	358.675.000	2 unit	358.675.000	2 unit	358.675.000	2 unit	358.675.000	2 unit	1.793.375.000
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan		1 Tahun	49.500.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	49.500.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		1 Tahun	120.000.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	120.000.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik dan penerangan kantor yang tersedia		1 Tahun	50.000.000	9	-	0	0	0	-	0	-	0	50.000.000

		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan		1 Tahun	536.200.000	11,407	536.200.000	11,407	536.200.000	11,407	536.200.000	11,407	536.200.000	11,407	2.681.000.000	
		Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang dipekerjakan		3 Orang 1 Tahun	325.115.000	58	325.115.000	58	325.115.000	58	325.115.000	58	325.115.000	58	1.625.575.000	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti		1 Tahun	3.074.200.000	1400	2.476.970.000	1400	2.681.970.000	1400	2.681.970.000	1400	2.681.970.000	1400	13.597.080.000	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		1 Tahun	531.970.000										531.970.000	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan gedung kantor yang disediakan		1 Tahun	50.000.000										50.000.000	
		Pengadaan Cetak Dokumen dan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat - Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan - Jumlah Jenis alat tulis kantor yang disediakan				3 jenis	181.800.000	3 jenis	196.500.000	3 jenis	196.500.000	3 jenis	196.500.000	3 jenis	771.300.000	
		Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi	- Jumlah jenis komponen listrik dan penerangan kantor yang tersedia - Tagihan rekening listrik, air dan komunikasi				9 dan 22	369.000.000	9 dan 22	374.000.000	9 dan 22	374.000.000	9 dan 22	374.000.000	9 dan 22	1.491.000.000	
2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>90%</b>	<b>7.821.380.000</b>	<b>90%</b>	<b>3.889.130.000</b>	<b>90%</b>	<b>4.490.793.250</b>	<b>90%</b>	<b>2.444.412.238</b>	<b>90%</b>	<b>2.536.074.073</b>	<b>90%</b>	<b>21.181.789.561</b>
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		270 Unit	644.200.000	657 Unit	1.050.110.000	600 Unit	812.085.750	600 Unit	895.704.738	657 Unit	825.242.354	2784 Unit	4.227.342.842	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Walikota/Wak o	Jumlah kendaraan dinas Walikota/Wakil Walikota yang diadakan		1 Unit	796.650.000			2 Unit	1.500.000.000		-		-	3 Unit	2.296.650.000	
		Pengadaan Kendaraan dinas Operasional	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang diadakan						1 Unit	600.000.000					1 unit	600.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		1 unit	200.000.000	1 unit	180.000.000	1 unit	180.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	180.000.000	1 unit	890.000.000	

	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	85 unit	781.030.000	85 unit	300.000.000	85 unit	400.000.000	85 unit	400.000.000	85 unit	300.000.000	425 unit	2.181.030.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	3 Unit	50.000.000	4 Unit	70.000.000	4 Unit	80.500.000	4 Unit	80.500.000	4 Unit	106.461.250	4 Unit	387.461.250
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	2 unit	100.000.000	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	100.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	15 unit	75.000.000	15	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	- Jumlah rumah jabatan yang dipelihara - Jumlah peralatan rumah jabatan/ dinas yang dipelihara			2 dan 15	200.000.000	2 dan 15	229.187.500	2 dan 15	229.187.500	2 dan 15	435.350.469	2 dan 15	1.093.725.469
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	120 unit%	124.500.000	14									124.500.000
	Rehab Sedang/Berat Gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/ berat	1 unit	3.000.000.000	1 unit	900.000.000							1 unit	3.900.000.000
	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhab sedang/ berat	2 Unit	2.050.000.000	2 Unit	500.000.000							2 Unit	2.550.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan peralatan Kantor	- Jumlah alat kantor yang dipelihara - Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan yang tersedia			120 Unit 14 Jenis	689.020.000	1230 Unit 14 Jenis	689.020.000	140 Unit 14 Jenis	689.020.000	140 Unit 14 Jenis	689.020.000	150 Unit 14 Jenis	2.756.080.000
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>84</b>	<b>120.000.000</b>	<b>85</b>	<b>108.000.000</b>	<b>85</b>	<b>200.000.000</b>	<b>86</b>	<b>200.000.000</b>	<b>87</b>	<b>200.000.000</b>	<b>87</b>	<b>828.000.000</b>
	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yng mengikuti Bimtek	15 orang	120.000.000	15 orang	108.000.000	15 orang	200.000.000	25 orang	200.000.000	25 orang	200.000.000	95 orang	828.000.000
4	<b>Program Keprotokoleran</b>	<b>Persentase terlaksananya fasilitasi pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>2.089.067.500</b>	<b>100%</b>	<b>1.711.262.625</b>	<b>100%</b>	<b>1.835.679.269</b>	<b>100%</b>	<b>1.962.595.272</b>	<b>100%</b>	<b>7.598.604.666</b>

	Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Dept/Lembaga/Pemerintah Non Departemen/LN	Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah yang difasilitasi	-	0	24 kali	65.000.000	24 kali	65.000.000	24 kali	100.000.000	24 kali	165.000.000	96 kali	395.000.000
	Penunjang Operasional Pidato Kepala Daerah	Jumlah dokumen Pidato yang disusun	-	84 dokumen	65.220.000	84 dokumen	65.220.000	84 dokumen	154.636.644	84 dokumen	165.220.000	336 Dokumen	450.296.644	
	Optimalisasi penyelenggaraan Keprotokolan	Jumlah kegiatan keprotokolan yang dilaksanakan	0	144 kali	458.847.500	144 kali	581.042.625	144 kali	581.042.625	144 kali	632.375.272	576 kali	2.253.308.022	
	Perwakilan Pemda Padang Panjang di Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana		4 paket	1.500.000.000	4 paket	1.000.000.000	4 paket	1.000.000.000	4 paket	1.000.000.000	4 paket	4.500.000.000	
5	<b>Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah</b>	<b>Jumlah OPD dengan nilai SAKIP sesuai dengan target Kota</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>144.000.000</b>	<b>13</b>	<b>144.000.000</b>	<b>18</b>	<b>144.000.000</b>	<b>18</b>	<b>144.000.000</b>	<b>24</b>	<b>576.000.000</b>
	Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen LAKIP			1 Dokumen	144.000.000	5 Dokumen	576.000.000						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kinerja,			12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60 Laporan		
		Jumlah perjanjian Kinerja yang dihasilkan			2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen		
		Persentase Ketercapaian IKU Kota			60%		70%		75%		80%	80%		
6	<b>Program Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan</b>	<b>Jumlah penataan Kelembagaan</b>	<b>1kali</b>	<b>113.075.000</b>	<b>3kali</b>	<b>132.800.000</b>	<b>1 kali</b>	<b>132.800.000</b>	<b>1 kali</b>	<b>82.800.000</b>	<b>1 kali</b>	<b>157.800.000</b>	<b>7 kali</b>	<b>619.275.000</b>
		<b>Jumlah Dokumen Tatalaksana</b>	<b>2 Dokumen</b>		<b>3 Dokumen</b>		<b>2 Dokumen</b>		<b>2 Dokumen</b>		<b>2 Dokumen</b>		<b>11 Dokumen</b>	
	Monitoring dan Evaluasi Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	1 kali	10.600.000	1 kali	12.800.000	5 kali	61.800.000						
	Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi yang disusun			1 Dokumen	40.000.000							1 Dokumen	40.000.000
	Penerapan kelas jabatan dalam sistem merit manajemen ASN	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi perubahan paradigma Manajemen ASN dalam menyikapi sistem merit berdasarkan kelas jabatan	60 orang	39.600.000			60 orang	40.000.000			60 orang	40.000.000	180 orang	119.600.000

		Penyusunan Analisa Jabatan dan Kelas Jabatan	Jumlah Dokumen Analisa Jabatan dan Kelas Jabatan			17 Kelas Jabatan	40.000.000			17 Kelas Jabatan	50.000.000			17 Kelas Jabatan	90.000.000		
		Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural	Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan struktural		1 Dokumen		18.500.000			1 Dokumen	20.000.000			1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	63.500.000
		Pembinaan SOP	Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan SOP		24 OPD		14.375.000		-	24 OPD	20.000.000	24 OPD	20.000.000	24 OPD	20.000.000	24 OPD	74.375.000
		Evaluasi Pelaksanaan SOTK	Jumlah Dokumen yang dihasilkan		1 Dokumen		30.000.000									1 Dokumen	30.000.000
		Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi							1 Dokumen	40.000.000			1 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	100.000.000
		Penyusunan Peta Proses Bisnis	Peta Proses Bisnis			1 Dokumen	40.000.000									1 Dokumen	40.000.000
7		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya fasilitasi pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan kepala daerah</b>		<b>100%</b>		<b>3.565.435.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.185.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>16.350.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.600.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>29.700.435.000</b>
		Operasional Rumah Jabatan KDH/WKDH	Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah		48 Jenis		2.600.335.000										2.600.335.000
		Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Dept/Lembaga/Pemerintah Non Departemen/LN	Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah yang difasilitasi		24 kali		65.000.000										65.000.000
		Penunjang Operasional Pidato Kepala Daerah	Jumlah dokumen Pidato yang disusun		84 Dokumen		65.220.000										65.220.000
		Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan hari besar Nasional yang dilaksanakan		6 kali		211.000.000										211.000.000
		Fasilitasi Peringatan HUT RI dan HUT Kota Padang Panjang	Jumlah peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Padang panjang yang dilaksanakan		2 kali		98.320.000										98.320.000
		Optimalisasi penyelenggaraan Keprotokolan	Jumlah kegiatan keprotokolan yang dilaksanakan		144 kali		361.110.000										361.110.000
		Pelaksanaan Kegiatan APEKSI	Jumlah Munas APEKSI dan Muskod APEKSI yang diikuti		2 kali		100.000.000										100.000.000

		Pemberian Gelar Kehormatan dan Penghargaan Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Gelar kehormatan dan penghargaan daerah	10 orang	64.450.000										64.450.000
		Penunjang Operasional Walikota dan Wakil walikota	Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah	-	-	7 jenis	2.778.450.000	7 jenis	2.952.372.500	7 jenis	16.105.741.125	7 jenis	3.343.528.181	7 jenis	25.180.091.806
		Penunjang Penyelenggaraan Acara Pemerintah Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Acara Pemerintah Daerah yang difasilitasi	-	-	48 kali	221.550.000	48 kali	232.627.500	48 kali	244.258.875	48 kali	256.471.819	48 kali	954.908.194
8		<b>Program Kerjasama Informasi dengan Media masa</b>	<b>Jumlah media publikasi dan share informasi berbagai kegiatan KDH dan pemerintah daerah</b>	<b>1 Media</b>	<b>302.080.000</b>										<b>302.080.000</b>
		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen informasi pembangunan kota Padang Panjang yang disebarluaskan	4 Dokumen	302.080.000										302.080.000
9		<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	<b>Jumlah Batas Antar Wilayah yang terselesaikan</b>	<b>2 kecamatan</b>	<b>58.000.000</b>	<b>2 kecamatan</b>	<b>66.700.000</b>	<b>2 kecamatan</b>	<b>324.800.000</b>						
		Pengelasan Batas Antar Daerah Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen Pembentukan Koordinat titik Batas antar Wilayah yang disusun	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	34.500.000	5 dokumen	168.000.000						
		Penamaan rupa bumi dan unsur alami	jumlah objek rupa bumi yang telah dipetakan	1 dokumen	28.000.000	1 dokumen	32.200.000	5 dokumen	156.800.000						
10		<b>Program Penyelenggaraan dan Pelaporan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai LPPD</b>	<b>3,10</b>	<b>7.300.000</b>	<b>3,14</b>	<b>408.035.500</b>	<b>3,15</b>	<b>453.363.325</b>	<b>3,20</b>	<b>505.490.324</b>	<b>3,25</b>	<b>700.436.372</b>	<b>3,25</b>	<b>2.074.625.521</b>
			<b>LKPJ</b>	<b>Diterima</b>											
		Penilaian Kompetensi Camat, Lurah,	Jumlah camat & Lurah, RT yang dinilai Kompetensinya	18 orang	7.300.000	18 orang	15.000.000	90 orang	67.300.000						
		Penyusunan Buku LKPJ Wako	Jumlah Buku LKPJ wako			1 buku	27.600.000	1 buku	27.600.000	1 buku	27.600.000	2 buku	77.600.000	5 buku	160.400.000
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun			1 Dokumen	63.250.000	1 Dokumen	63.250.000	1 Dokumen	63.250.000	2 Dokumen	98.250.000	5 Dokumen	288.000.000
		Pembuatan Buku Memori Walikota Padang Panjang 2018-2023	Jumlah Buku Memori Walikota Padang Panjang 2018-2023	0	0	0	-	0	0	0	-	1 buku	50.000.000	1 buku	50.000.000

11	Fasilitasi Peringatan HUT RI dan HUT Kota Padang Panjang	Jumlah peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Padang Panjang yang dilaksanakan, Jumlah Tokoh Masyarakat yang diberi penghargaan	0	0	2 kegiatan	112.105.500	2 kegiatan	112.105.500	2 kegiatan	147.732.430	2 kegiatan	171.242.294	8 kegiatan	543.185.724
			0	0	10 orang		10 orang		10 orang		10 orang		40 orang	
	Pelaksanaan Kegiatan APEKSI	Jumlah Munas APEKSI dan Muskod APEKSI yang diikuti	0	0	2 kali	110.000.000	2 kali	132.250.000	2 kali	143.087.500	2 kali	165.900.625	8 kali	551.238.125
	Pemberian Gelar Kehormatan dan Penghargaan Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Gelar kehormatan dan penghargaan daerah			15 orang	69.280.000	15 orang	92.357.825	15 orang	98.020.394	15 orang	111.643.453	60 orang	371.301.672
	Pelaksanaan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Jumlah bidang Fasilitasi pencapaian SPM			6 bidang	10.800.000	6 bidang	43.200.000						
	<b>Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah</b>	<b>Jumlah OPD dengan nilai SAKIP <math>\leq</math> 50</b>	<b>8</b>	<b>243.346.250</b>		-	0		-		-		-	243.346.250
	Penyusunan LAKIP Kota Padang Panjang	Jumlah buku LAKIP Kota Padang Panjang	1 Dokumen	86.756.250	0	-	0	0	0	-	0	-	-	86.756.250
		Persentase ketercapaian IKU Kota	58%											0
	Evaluasi Kinerja OPD Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen Laporan evaluasi Kinerja OPD Kota Padang Panjang	13 Dokumen	31.300.000	0	-	0	0	0	-	0	-	-	31.300.000
	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	16.320.000	0	-	0	0	0	-	0	-	-	16.320.000
	Penyusunan Buku LKPJ Wako	Jumlah Dokumen LKPJ Wako	1 Dokumen	24.000.000	0	-	0	0	0	-	0	-	-	24.000.000
Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Daerah (LPPD)	1 Dokumen	55.000.000	0	-	0	0	0	-	0	-	-	55.000.000	
Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	12 kali	29.970.000	0	-	0	0	0	-	0	-	-	29.970.000	

12	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum yang disahkan dan disetujui serta tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi	90%	720.890.000	90%	761.500.000	90%	761.500.000	100%	761.500.000	100%	761.500.000	100%	3.766.890.000		
		Persentase masalah hukum masyarakat dan pemerintah daerah yang dapat diselesaikan	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Penyelesaian Masalah Hukum Penda dan Masalah Hukum Masyarakat	Jumlah laporan permasalahan hukum pemerintah daerah dan masyarakat yang difasilitasi serta perkara dibidang perdata dan TUN yang diselesaikan	1 laporan	0	2 laporan	460.000.000	8 laporan	1.840.000.000								
	Penyelesaian Masalah Hukum Penda	Jumlah permasalahan hukum Pemerintahan Daerah	1 laporan	427.150.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1 laporan	427.150.000	
	Pengharmonisan, Pembulatan dan Pemantapan Konsep Produk Hukum Daerah	- Jumlah peraturan daerah - Peraturan kepala daerah yang dihasilkan	- 8 Perda - 20 Perwako	122.000.000	8 Perda dan 25 Perwako	130.000.000	8 Perda dan 25 Perwako	130.000.000	8 Perda dan 25 Perwako	130.000.000	8 Perda dan 25 Perwako	130.000.000	8 Perda dan 25 Perwako	130.000.000	40 Perda dan 120 Perwako	642.000.000
	Pembuatan Berita Daerah dan Lembaran Daerah	- Jumlah buku lembaran Daerah dan Berita Daerah yang diterbitkan - Jumlah Produk Hukum yang diupload dalam Web JDih	- 450 buku  - 450 buku	96.000.000	- 200 buku  - 200 buku	100.000.000	- 1.250 buku  - 1.250 buku	496.000.000								
	Penyelesaian Masalah Hukum Bagi Masyarakat	Jumlah Masalah Hukum Masyarakat yang difasilitasi	1 laporan	20.000.000	0	-	0	0	0	-	0	-	0	0	20.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 orang	45.740.000	0	-	0	0	0	-	0	-	0	200 orang	45.740.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			200 orang	60.000.000	800 orang	240.000.000								
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RANHAM	Jumlah laporan Rencana Aksi Nasional HAM di Kota Padang Panjang yang disusun	1 laporan	10.000.000	1 laporan	11.500.000	5 laporan	56.000.000									

Terselenggaranya Pelayanan Publik yang berkualitas dan Melayani				Indek Kepuasan Masyarakat	78 (baik)		79 (baik)		80 (baik)		81 (baik)		82 (baik)		82 (baik)	
	Meningkatnya Pelayanan Publik			Standar Pelayanan Minimal	84,67		86,33		87,83		89,67		92,50		92,50	
	13	Program Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,45		3,25	438.730.000	3,30	404.947.500	3,35	458.189.625	3,40	519.418.069	3,45	589.830.779	3,45	2.411.115.973
		Pelaksanaan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)		Jumlah bidang Fasilitas pencapaian SPM	6 bidang	10.080.000									6 bidang	10.080.000
		Pembinaan Pelayanan Publik		Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan Baku Mutu Pelayanan Publik di Kota Padang Panjang	24 OPD	50.000.000	24 OPD	50.000.000	24 OPD	50.000.000	24 OPD	50.000.000	24 OPD	50.000.000	24 OPD	250.000.000
		Survey Kepuasan Masyarakat		Jumlah Unit Layanan yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat	20 Unit Layanan	308.650.000	24 Unit Layanan dan 1 Dokumen	354.947.500	24 Unit Layanan	408.189.625	24 Unit Layanan	469.418.069	24 Unit Layanan	539.830.779	24 Unit Layanan	2.081.035.973
		Peningkatan pelayanan berstandar ISO 9001		Jumlah evaluasi ISO 9001 yang dilaksanakan	1 kali	70.000.000									1 kali	70.000.000
Meningkatnya aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat				Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid	38,82		56,58		74,34		90,79		100		100	
	Meningkatkan aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat			Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid	38,82		56,58		74,34		90,79		100		100	
	14	Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Budaya dan keagamaan		Peringkat prestasi Kafilah MTQ Kota Padang Panjang di Tingkat Propinsi	Peringkat 9	9.360.475.000		8.668.730.000	Peringkat 8	10.771.415.200	-	9.924.270.424	Peringkat 7	11.192.362.864	Peringkat 7	49.917.253.488
				Jumlah sekolah yang mendapat peringkat LSS tingkat propinsi	1 sekolah		2 sekolah		3 sekolah		4 sekolah		5 sekolah		5 sekolah	

		SMART SURAU	Jumlah Surau Yang Telah Melaksanakan Kegiatan Smart Surau		0		4 Unit	365.000.000	
		Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah UKS se Kota Padang Panjang yang dibina		4 Sekolah	169.125.000	4 Sekolah	170.000.000	
		Muzakarah Ulama Kota	Jumlah Rumusan yang dihasilkan pada Muzakarah Ulama Kota Padang Panjang		4 rumusan	109.175.000	4 rumusan	125.000.000	4
		Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam	Jumlah peringatan Hari-hari Besar Islam yang diselenggarakan		8 Kegiatan	157.100.000	8 Kegiatan	170.000.000	8
		Akreditasi, Pelatihan dan Sertifikasi Guru TPQ/TPSQ	- Persentase guru TPQ/TPSQ yang bersertifikasi		0	123.625.000	60 TPQ/TPSQ	130.000.000	5
			- Jumlah TPQ/TPSQ Yang Mengikuti Khatam Bersama		35 TPQ		37 TPQ		
			- Jumlah Lembaga Didikan Shubuh Yang Dinilai		8		8		
		Penunjang Kegiatan Tim Ramadhan	Jumlah Masjid Yang Dikunjungi		12 Masjid	190.200.000	14 Masjid	218.730.000	
		Peningkatan Kesejahteraan Guru TPQ/TPSQ, Imam Mesjid dan Charin/Petugas Kebersihan Mesjid/Mushalla Kota Padang Panjang	- Jumlah guru TPQ yang diberi honor		250 orang	4.930.075.000	250 orang	5.100.000.000	
			- Jumlah Imam masjid yang difasilitasi honor		40 Orang		40 Orang		
			- Garin Masjid/ Petugas kebersihan yang difasilitasi honor		115 Orang		115 Orang		
			- khatib cadangan yang difasilitasi honor		40 Orang		40 Orang		
		Fasilitasi Keberangkatan dan Penjemputan Haji	Jumlah jemaah haji yang difasilitasi keberangkatan dan penjemputannya		225 Orang	196.100.000	225 Orang	200.000.000	2
		Persiapan (TC)	- Jumlah kafilah yang		102 peserta	2.044.320.000			1



			Fasilitasi Kegiatan Islamic Center	Operasional Islamic Centre yang disiapkan		1 laporan	512.125.000	1 laporan	600.000.000
			Pembinaan Kampung Tahfiz Al Quran	Jumlah kampung Tahfiz Qur'an yang terbentuk		2 kampung Tahfiz	114.780.000	4 kampung Tahfiz	130.000.000
			Subuh Mubarakah	Jumlah Kegiatan Subuh Mubarakah Yang dilaksanakan		11 Kali	181.600.000	11 Kali	200.000.000
			Peringatan Hari Santri	Jumlah laporan Peringatan Hari Santri Nasional di Kota Padang Panjang		1 laporan	300.000.000	1 laporan	400.000.000
<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian dan Pembangunan Daerah</b>				<b>Persentase Implementasi kebijakan perekonomian</b>		<b>70,00</b>		<b>77,50</b>	
	<b>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian</b>			<b>Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang</b>		<b>80</b>		<b>85</b>	
	<b>15</b>		<b>Program Peningkatan Koordinasi Perekonomian Daerah</b>	<b>Persentase Implementasi kebijakan perekonomian</b>		<b>90%</b>	<b>195.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>300.000.000</b>
			Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah monitoring Pengendalian Laju Inflasi daerah di Kota Padang		4 kali	50.000.000	4 kali	140.000.000

		Koordinasi Kebijakan Umum Pangan, Pertanian dan UMKM	Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan kebijakan umum Pangan, Pertanian dan UMKM	0	0	4 kali	30.000.000	4 kali	35.000.000	4 kali	40.000.000	4 kali	40.000.000	16 kali	145.000.000
		Monitoring dan Evaluasi Perkembangan KPRI Kota Padang Panjang	Jumlah KPRI yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi perkembangannya	26 KPRI	35.000.000	26 KPRI	40.000.000	26 KPRI	195.000.000						
		Koordinasi Kebijakan Bidang Sarana dan Kelembagaan ekonomi daerah	Jumlah monitoring dan evaluasi Kebijakan Bidang Sarana dan Kelembagaan ekonomi daerah yang dilaksanakan	4 kali	50.000.000	4 kali	43.000.000	4 kali	50.000.000	4 kali	50.000.000	4 kali	50.000.000	20 kali	243.000.000
		Koordinasi Kebijakan Umum Lingkungan	Jumlah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan Umum Lingkungan Hidup	1kali	35.000.000									2 kali, 1 dokumen	35.000.000
		Koordinasi Kebijakan Umum Lingkungan dan Penanaman Modal	Jumlah Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan Umum Lingkungan Hidup	0	0	4 kali	47.000.000	4 kali	60.000.000	4 kali	60.000.000	4 kali	60.000.000	16 kali	227.000.000
	Meningkatkan pencapaian pembangunan daerah		<b>Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan</b>	<b>70</b>		<b>75</b>		<b>75</b>		<b>80</b>		<b>85</b>		<b>85</b>	
	16	<b>Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</b>	<b>95%</b>	<b>453.430.000</b>	<b>95%</b>	<b>1.393.142.000</b>	<b>95%</b>	<b>1.402.988.300</b>	<b>95%</b>	<b>1.413.601.400</b>	<b>95%</b>	<b>1.426.266.610</b>	<b>95%</b>	<b>6.089.428.310</b>
		Monitoring Terhadap Realisasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah OPD yang dimonitoring dan dievaluasi Pembangunan	12 Laporan	30.985.000									12 Laporan	30.985.000
		Monitoring Terhadap Realisasi Kegiatan Pembangunan dan Rapat Evaluasi	Jumlah OPD yang dimonitoring dan dievaluasi Pembangunan dan Sosialisasi Aplikasi Simbangda yang dilaksanakan			12 laporan dan 80 orang	70.000.000	12 laporan dan 80 orang	280.000.000						
		Pendidikan dan Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah peserta bimbingan dan pelatihan pengadaan secara elektronik (SPSE dan aplikasi pendukungnya)	110 orang	71.425.000	110 orang	80.000.000	550 orang	391.425.000						
		Operasional Maintenance LPSE	Jumlah Infrastruktur LPSE yang terpelihara	1 paket	78.000.000	1 paket	897.000.000	5 paket	3.666.000.000						

		Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi pokja ULP dan PPK		80 orang	28.860.000	80 orang	57.002.000
		Bimbingan Teknis dan Pembekalan Petugas Pengawas Teknis lapangan	Jumlah Bimbingan Teknis dan Pembekalan Petugas Pengawas Teknis lapangan		80 orang	17.080.000		-
		Bintek Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Infrastruktur	Jumlah peserta Bintek Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Infrastruktur		80 orang	23.480.000		-
		Fasilitasi Kerjasama dengan LKPP	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan			33.600.000	2 orang	38.640.000
		Koordinasi Aksi Anti KKN Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Koordinasi Aksi Anti KKN Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa		80 org	170.000.000	80 org	170.000.000
		Peningkatan pelayanan berstandar ISO 9001	Jumlah evaluasi ISO 9001 yang dilaksanakan				1 kali	80.500.000
		<b>Jumlah</b>				30.678.233.250		27.354.622.900



**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA**  
**TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Untuk mengukur kinerja Sekretariat Daerah dalam mencapai RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, telah ditetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang selama tahun 2018-2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 di gambarkan melalui Tabel 7.1 berikut :

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023**

INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL (TAHUN 2017)	Target Sasaran Kinerja Sasaran Pada tahun ke					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
Predikat sistem Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	B	B (60,1)	BB (65)	BB (70,1)	BB (75)	A (80,02)	100
Nilai Sakip	CC	B (60,1)	BB (65)	BB (70,1)	BB (75)	A (80,02)	A (80,02)
Nilai LKPPD		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Persentase pemenuhan		90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

elayanan Adminitrasi Perkantoran							
Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		84	85	85	86	87	87
Persentase terlaksananya fasilitasi pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah yang terlaksana			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Jumlah OPD dengan nilai SAKIP sesuai dengan target Kota			13	13	18	18	24
Jumlah penataan Kelembagaan		1 kali	3 kali	1 kali	1 kali	1 kali	7 kali
Jumlah Dokumen Tatalaksana		2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	11 dokumen
Persentase terlaksananya fasilitasi pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan kepala daerah		0	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah media		1 media					

pubikasi dan share informasi berbagai kegiatan KDH dan pemerintah daerah							
Jumlah Batas Antar Wilayah yang terselesaikan		2 kec	2 kec	2 kec	2 kec	2 kec	2 kec
Nilai LPPD		3.10	3.14	3.15	3.20	3.25	3.25
LKPJ		Diterima	Diterima	Diterima	Diterima	Diterima	Diterima
Jumlah OPD dengan nilai SAKIP >50		0	10	12	14	16	16
Persentase produk hukum yang disahkan dan disebarluaskan dan tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi		90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Persentase masalah hukum masyarakat dan pemerintah daerah yang dapat diselesaikan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Indeks Kepuasan Masyarakat		78 (Baik)	79 Baik	80 (Baik)	81 (Baik)	82 (Baik)	82 (Baik)
Standar Pelayanan Minimal		84,67	86,33	87,83	89,67	92,50	92,50

Nilai rata rata kualitas pelayanan publik		3.25	3.30	3.35	3.40	3.45	3.45
Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid		38.82	56.58	74.34	90.79	100	100
Peringkat prestasi Kafilah MTQ Kota Padang Panjang di Tingkat Propinsi		Peringkat 9		Peringkat 8		Peringkat 7	Peringkat 7
Jumlah sekolah yang mendapat peringkat LSS tingkat propinsi		1 sekolah	2 sekolah	3 sekolah	4 sekolah	5 sekolah	5 sekolah
Persentase Implementasi kebijakan perekonomian		80	85	90	90	90	90
Persentase Implementasi kebijakan perekonomian		90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan		70	75	75	80	85	85
Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) ini adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk periode 5 (lima) tahun yang bersifat teknis strategis yang disusun berdasarkan kondisi eksisting, analisis lingkungan strategis serta mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan Kota Padang Panjang. Renstra ini disusun dengan harapan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis ini juga merupakan acuan bagi Sekretariat Daerah berikut dengan seluruh unsur staf di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Rencana Strategis secara proporsional dan profesional tentunya sangat membutuhkan komitmen dan dukungan bersama, baik dari unsur pimpinan beserta seluruh staf, ketersediaan SDM Aparatur, dana, sarana dan prasarana di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, maupun dukungan dari seluruh Perangkat Daerah.

## **7.2. Pengendalian dan Evaluasi**

Untuk melihat tingkat kemajuan atau capaian dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga efektifitas pelaksanaannya, diperlukan suatu sistem atau mekanisme pengendalian yang komprehensif dan evaluasi secara berkala. Pengendalian dan Evaluasi dimaksud dilaksanakan baik dalam periode tahunan maupun lima tahunan sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas.

Padang Panjang,

2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si.**

**Pembina Utama Madya/NIP. 19750331 199501 1 001**

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

melalui Tabel 7.1 berikut :



TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja/Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang dipekerjakan		3 Orang 1 Tahun	325,115,000	58	325,115,000	58	325,115,000	58	325,115,000	58	325,115,000	58	1,625,575,000	
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti		1 Tahun	3,074,200,000	1400	2,476,970,000	1400	2,681,970,000	1400	2,681,970,000	1400	2,681,970,000	1400	13,597,080,000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		1 Tahun	531,970,000										531,970,000	
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan gedung kantor yang disediakan		1 Tahun	50,000,000										50,000,000	
			Pengadaan Cetak Dokumen dan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat - Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan - Jumlah Jenis alat tulis kantor yang disediakan				3 jenis, 10 jenis, 28 jenis	181,800,000	3 jenis, 10 jenis, 28 jenis	196,500,000	3 jenis, 10 jenis, 28 jenis	196,500,000	3 jenis, 10 jenis, 28 jenis	196,500,000	3 jenis, 10 jenis, 28 jenis	771,300,000	
			Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi	- Jumlah jenis komponen listrik dan penerangan kantor yang tersedia - Tagihan rekening listrik, air dan komunikasi				9 dan 22	369,000,000	9 dan 22	374,000,000	9 dan 22	374,000,000	9 dan 22	374,000,000	9 dan 22	1,491,000,000	
		2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>90%</b>	<b>7,821,380,000</b>	<b>90%</b>	<b>3,889,130,000</b>	<b>90%</b>	<b>5,133,213,250</b>	<b>90%</b>	<b>2,444,412,238</b>	<b>90%</b>	<b>2,536,074,073</b>	<b>90%</b>	<b>21,824,209,561</b>
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		270 Unit	644,200,000	657 Unit	1,050,110,000	600 Unit	812,085,750	600 Unit	895,704,738	657 Unit	825,242,354	2784 Unit	4,227,342,842	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Walikota/Wakil Walikota	Jumlah kendaraan dinas Walikota/Wakil Walikota yang diadakan		1 Unit	796,650,000			2 Unit	1,500,000,000		-		-	3 Unit	2,296,650,000	
			Pengadaan Kendaraan dinas Operasional	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang diadakan						1 Unit	600,000,000					1 unit	600,000,000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		1 unit	200,000,000	1 unit	180,000,000	1 unit	180,000,000	1 unit	150,000,000	1 unit	180,000,000	1 unit	890,000,000	
			Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		85 unit	781,030,000	85 unit	300,000,000	85 unit	400,000,000	85 unit	400,000,000	85 unit	300,000,000	425 unit	2,181,030,000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara		3 Unit	50,000,000	4 Unit	70,000,000	4 Unit	80,500,000	4 Unit	80,500,000	4 Unit	106,461,250	4 Unit	387,461,250	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		2 unit	100,000,000	2 unit	-	2 unit	100,000,000							

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja/Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara		15 unit	75,000,000	15	-	-	-	-	-	-	-	75,000,000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	- Jumlah rumah jabatan yang dipelihara - Jumlah peralatan rumah jabatan/ dinas yang dipelihara				2 dan 15	200,000,000	2 dan 15	229,187,500	2 dan 15	229,187,500	2 dan 15	435,350,469	2 dan 15	1,093,725,469
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara		120 unit	124,500,000	14								124,500,000	
			Rehab Sedang/Berat Gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/ berat		1 unit	3,000,000,000	1 unit	900,000,000							1 unit	3,900,000,000
			Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhab sedang/ berat		2 Unit	2,050,000,000	2 Unit	500,000,000	1 unit	642,420,000					2 Unit	3,192,420,000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan peralatan Kantor	- Jumlah alat kantor yang dipelihara - Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan yang tersedia				120 Unit 14 Jenis	689,020,000	1230 Unit 14 Jenis	689,020,000	140 Unit 14 Jenis	689,020,000	140 Unit 14 Jenis	689,020,000	150 Unit 14 Jenis	2,756,080,000
		3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>		<b>84</b>	<b>120,000,000</b>	<b>85</b>	<b>108,000,000</b>	<b>85</b>	<b>200,000,000</b>	<b>86</b>	<b>200,000,000</b>	<b>87</b>	<b>200,000,000</b>	<b>87</b>	<b>828,000,000</b>
			Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek		15 orang	120,000,000	15 orang	108,000,000	15 orang	200,000,000	25 orang	200,000,000	25 orang	200,000,000	95 orang	828,000,000
		4	<b>Program Keprotokoleran</b>	<b>Persentase terlaksananya fasilitasi pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terlaksana</b>		<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>2,291,155,500</b>	<b>100%</b>	<b>1,902,984,561</b>	<b>100%</b>	<b>2,037,767,269</b>	<b>100%</b>	<b>2,164,683,272</b>	<b>100%</b>	<b>8,396,590,602</b>
			Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/ Dept/ Lembaga/ Pemerintah Non Departemen/LN	Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah yang difasilitasi		-	0	24 kali	65,000,000	24 kali	65,000,000	24 kali	100,000,000	24 kali	165,000,000	96 kali	395,000,000
			Penunjang Operasional Pidato Kepala Daerah	Jumlah dokumen Pidato yang disusun		-	84 dokumen	65,220,000	84 dokumen	65,220,000	84 dokumen	154,636,644	84 dokumen	165,220,000	336 Dokumen	450,296,644	
			Optimalisasi penyelenggaraan Keprotokoleran	Jumlah kegiatan keprotokoleran yang dilaksanakan		0	144 kali	458,847,500	144 kali	581,042,625	144 kali	581,042,625	144 kali	632,375,272	576 kali	2,253,308,022	
			Perwakilan Pemda Padang Panjang di Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana			4 paket	1,500,000,000	4 paket	1,000,000,000	4 paket	1,000,000,000	4 paket	1,000,000,000	4 paket	4,500,000,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja/Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Dokumentasi dan Pengolahan Informasi Kegiatan Walikota/Wakil Walikota	Jumlah Dokumentasi dan Pengolahan Informasi Kegiatan Walikota/Wakil Walikota			1 Dokumen	202,088,000	1 Dokumen	191,721,936	1 Dokumen	202,088,000	1 Dokumen	202,088,000	4 Dokumen	797,985,936	
		5	Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah OPD dengan nilai SAKIP sesuai dengan target Kota		13	0	13	144,000,000	13	144,000,000	18	144,000,000	18	144,000,000	24	576,000,000
			Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen LAKIP			1 Dokumen	144,000,000	1 Dokumen	144,000,000	1 Dokumen	144,000,000	1 Dokumen	144,000,000	5 Dokumen	576,000,000	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kinerja			12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		60 Laporan		
				Jumlah perjanjian Kinerja yang dihasilkan			2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		8 Dokumen		
				Persentase Ketercapaian IKU Kota			60%		70%		75%		80%		80%		
		6	Program Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan	Jumlah penataan Kelembagaan		1kali	113,075,000	3kali	132,800,000	1 kali	132,800,000	1 kali	82,800,000	1 kali	157,800,000	7 kali	619,275,000
				Jumlah Dokumen Tatalaksana		2 Dokumen		3 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		11 Dokumen	
			Monitoring dan Evaluasi Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan		1 kali	10,600,000	1 kali	12,800,000	1 kali	12,800,000	1 kali	12,800,000	1 kali	12,800,000	5 kali	61,800,000
			Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi yang disusun			1 Dokumen	40,000,000							1 Dokumen	40,000,000	
			Penerapan kelas jabatan dalam sistem merit manajemen ASN	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi perubahan paradigma Manajemen ASN dalam menyikapi sistem merit berdasarkan kelas jabatan		60 orang	39,600,000			60 orang	40,000,000			60 orang	40,000,000	180 orang	119,600,000
			Penyusunan Analisa Jabatan dan Kelas Jabatan	Jumlah Dokumen Analisa Jabatan dan Kelas Jabatan			17 Kelas Jabatan	40,000,000			17 Kelas Jabatan	50,000,000			17 Kelas Jabatan	90,000,000	
			Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural	Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan struktural		1 Dokumen	18,500,000			1 Dokumen	20,000,000			1 Dokumen	25,000,000	3 Dokumen	63,500,000
			Pembinaan SOP	Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan SOP		24 OPD	14,375,000		-	24 OPD	20,000,000	24 OPD	20,000,000	24 OPD	20,000,000	24 OPD	74,375,000
			Evaluasi Pelaksanaan SOTK	Jumlah Dokumen yang dihasilkan		1 Dokumen	30,000,000								1 Dokumen	30,000,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja/Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi					1 Dokumen	40,000,000			1 Dokumen	60,000,000	2 Dokumen	100,000,000		
			Penyusunan Peta Proses Bisnis	Peta Proses Bisnis			1 Dokumen	40,000,000							1 Dokumen	40,000,000		
		7	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya fasilitas pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan kepala daerah</b>			100%	3,565,435,000	100%	3,000,000,000	100%	3,185,000,000	100%	16,350,000,000	100%	3,600,000,000	100%	29,700,435,000
			Operasional Rumah Jabatan KDH/WKDH	Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah		48 Jenis	2,600,335,000								48 Jenis	2,600,335,000		
			Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Dept/Lembaga/Pemerintah Non Departemen Luar Negeri	Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah yang difasilitasi		24 kali	65,000,000								24 kali	65,000,000		
			Penunjang Operasional Pidato Kepala Daerah	Jumlah dokumen Pidato yang disusun		84 Dokumen	65,220,000								84 Dokumen	65,220,000		
			Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan hari besar Nasional yang dilaksanakan		6 kali	211,000,000								6 kali	211,000,000		
			Fasilitasi Peringatan HUT RI dan HUT Kota Padang Panjang	Jumlah peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Padang Panjang yang dilaksanakan		2 kali	98,320,000								2 kali	98,320,000		
			Optimalisasi penyelenggaraan Keprotokolan	Jumlah kegiatan keprotokolan yang dilaksanakan		144 kali	361,110,000								144 kali	361,110,000		
			Pelaksanaan Kegiatan APEKSI	Jumlah Munas APEKSI dan Muskod APEKSI yang diikuti		2 kali	100,000,000								2 kali	100,000,000		
			Pemberian Gelar Kehormatan dan Penghargaan Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Gelar kehormatan dan penghargaan daerah		10 orang	64,450,000								10 orang	64,450,000		
			Penunjang Operasional Walikota dan Wakil walikota	Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah		-	-	7 jenis	2,778,450,000	7 jenis	2,952,372,500	7 jenis	16,105,741,125	7 jenis	3,343,528,181	7 jenis	25,180,091,806	
			Penunjang Penyelenggaraan Acara Pemerintah Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Acara Pemerintah Daerah yang difasilitasi		-	-	48 kali	221,550,000	48 kali	232,627,500	48 kali	244,258,875	48 kali	266,471,819	48 kali	954,908,194	

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja/Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		8	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Jumlah media publikasi dan share informasi berbagai kegiatan KDH dan pemerintah daerah		1 Media	302,080,000										302,080,000	
			Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen informasi pembangunan kota Padang Panjang yang disebarluaskan Daerah		4 Dokumen	302,080,000										4 Dokumen	302,080,000
		9	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Batas Antar Wilayah yang terselesaikan		2 kecamatan	58,000,000	2 kecamatan	66,700,000	2 kecamatan	324,800,000							
			Penegasan Batas Antar Daerah	Jumlah dokumen Pembentukan Koordinat titik Batas antar Wilayah yang disusun		1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	34,500,000	5 dokumen	168,000,000							
			Penamaan rupa bumi dan unsur alami	jumlah objek rupa bumi yang telah dipetakan		1 dokumen	28,000,000	1 dokumen	32,200,000	5 dokumen	156,800,000							
		10	Program Penyelenggaraan dan Pelaporan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD		3,10	7,300,000	3,14	408,035,500	3,15	453,363,325	3,20	505,490,324	3,25	700,436,372	3,25	2,074,625,521	
			LKPJ			Diterima		Diterima		Diterima		Diterima		Diterima		Diterima		
			Penilaian Kompetensi Camat, Lurah, Sekretaris Lurah dan RT	Jumlah camat & Lurah, RT yang dinilai Kompetensinya		18 orang	7,300,000	18 orang	15,000,000	90 orang	67,300,000							
			Penyusunan Buku LKPJ Wako	Jumlah Buku LKPJ wako				1 buku	27,600,000	1 buku	27,600,000	1 buku	27,600,000	2 buku	77,600,000	5 buku	160,400,000	
			Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun				1 Dokumen	63,250,000	1 Dokumen	63,250,000	1 Dokumen	63,250,000	2 Dokumen	98,250,000	5 Dokumen	288,000,000	
			Pembuatan Buku Memori Walikota Padang Panjang 2018-2023	Jumlah Buku Memori Walikota Padang Panjang 2018-2023		0	0	0	-	0	0	0	-	1 buku	50,000,000	1 buku	50,000,000	
			Fasilitasi Peringatan HUT RI dan HUT Kota Padang Panjang	Jumlah peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Padang panjang yang dilaksanakan,		0	0	2 kegiatan	112,105,500	2 kegiatan	112,105,500	2 kegiatan	147,732,430	2 kegiatan	171,242,294	8 kegiatan	543,185,724	
			Jumlah Tokoh Masyarakat yang diberi penghargaan			0	0	10 orang		10 orang		10 orang		10 orang		40 orang		
			Pelaksanaan Kegiatan APEKSI	Jumlah Munas APEKSI dan Muskod APEKSI yang diikuti		0	0	2 kali	110,000,000	2 kali	132,250,000	2 kali	143,087,500	2 kali	165,900,625	8 kali	551,238,125	
			Pemberian Gelar Kehormatan dan Penghargaan Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Gelar kehormatan dan penghargaan daerah				15 orang	69,280,000	15 orang	92,357,825	15 orang	98,020,394	15 orang	111,643,453	60 orang	371,301,672	

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja/Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Pelaksanaan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Jumlah bidang Fasilitas pencapaian SPM			6 bidang	10,800,000	6 bidang	43,200,000							
		11	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah	Jumlah OPD dengan nilai SAKIP $\leq 50$		8	243,346,250		-		0		-		-	243,346,250	
			Penyusunan LAKIP Kota Padang Panjang	Jumlah buku LAKIP Kota Padang Panjang		1 Dokumen	86,756,250	0	-	0	0	-	0	-		86,756,250	
				Persentase ketercapaian IKU Kota		58%										0	
			Evaluasi Kinerja OPD Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen Laporan evaluasi Kinerja OPD Kota Padang Panjang		13 Dokumen	31,300,000	0	-	0	0	-	0	-		31,300,000	
			Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja		2 Dokumen	16,320,000	0	-	0	0	-	0	-		16,320,000	
			Penyusunan Buku LKPI Wako	Jumlah Dokumen LKPI Wako		1 Dokumen	24,000,000	0	-	0	0	-	0	-		24,000,000	
			Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Daerah (LPPD)		1 Dokumen	55,000,000	0	-	0	0	-	0	-		55,000,000	
			Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan		12 kali	29,970,000	0	-	0	0	-	0	-		29,970,000	
		12	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum yang disahkan dan disebarkan dan tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi		90%	720,890,000	90%	761,500,000	90%	761,500,000	100%	761,500,000	100%	761,500,000	100%	3,766,890,000
				Persentase masalah hukum masyarakat dan pemerintah daerah yang dapat diselesaikan		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			Penyelesaian Masalah Hukum Pemda dan Masalah Hukum Masyarakat	Jumlah laporan permasalahan hukum pemerintah daerah dan masyarakat yang difasilitasi serta perkara dibidang perdata dan TUN yang diselesaikan		1 laporan	0	2 laporan	460,000,000	8 laporan	1,840,000,000						
			Penyelesaian Masalah Hukum Pemda	Jumlah permasalahan hukum Pemerintahan Daerah		1 laporan	427,150,000	-	-	-	0	-	-	-	1 laporan	427,150,000	





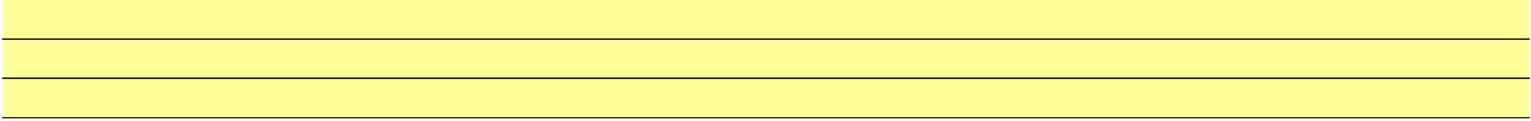
TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja/Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Mesjid/Mushalla Kota Padang Panjang	- Garin Masjid/ Petugas kebersihan yang difasilitasi honor - khatib cadangan yang difasilitasi honor		115 Orang 40 Orang		115 Orang 40 Orang		115 Orang 40 Orang		115 Orang 40 Orang		115 Orang 40 Orang		115 Orang 40 Orang		
			Fasilitasi Keberangkatan dan Penjemputan Haji	Jumlah jemaah haji yang difasilitasi keberangkatan dan penjemputannya		225 Orang 196,100,000		225 Orang 200,000,000		225 Orang 200,000,000		225 Orang 200,000,000		225 Orang 200,000,000		1125 Orang 996,100,000		
			Persiapan (TC) dan Pelaksanaan Mengikuti MTQ Propinsi Sumatera Barat	- Jumlah kafilah yang mengikuti TC MTQ Propinsi Sumbar - Jumlah kafilah yang mengikuti MTO		102 peserta TC, 60orang Kafilah MTQ		102 peserta TC, 60orang Kafilah MTO		102 peserta TC, 60orang Kafilah MTO		102 peserta TC, 60orang Kafilah MTQ		102 peserta TC, 60orang Kafilah MTQ		102 peserta TC, 60orang Kafilah MTQ		7,447,933,200
			Pelaksanaan MTQ Kota Padang Panjang	Jumlah kegiatan MTQ Tingkat Kota Padang Panjang		2 Kec, 16 Kel 500,000,000		2 Kec, 16 Kel 500,000,000		2 Kec, 16 Kel 500,000,000		2 Kec, 16 Kel 600,000,000		2 Kec, 16 Kel 600,000,000		2 Kec, 16 Kel 1,100,000,000		
			Pembinaan Remaja Mesjid	Jumlah mesjid yang menyelenggarakan kegiatan Remaja Mesjid		34 Masjid 264,100,000		34 Masjid 290,000,000		34 Masjid 290,000,000		34 Masjid 290,000,000		34 Masjid 290,000,000		34 Masjid 1,424,100,000		
			Fasilitasi Kegiatan Wirid Pengajian Majelis Taklim Bulanan	Jumlah Mesjid yang menyelenggarakan kegiatan Remaja Mesjid		34 Kelompok 68,150,000		34 Kelompok 70,000,000		34 Kelompok 70,000,000		34 Kelompok 70,000,000		34 Kelompok 70,000,000		34 Kelompok 348,150,000		
			Fasilitasi Kegiatan Islamic Center	Operasional Islamic Centre yang disiapkan		1 laporan 512,125,000		1 laporan 600,000,000		1 laporan 600,000,000		1 laporan 600,000,000		1 laporan 600,000,000		5 laporan 2,912,125,000		
			Pembinaan Kampung Tahfiz Al Quran	Jumlah kampung Tahfiz Qur'an yang terbentuk		2 kampung Tahfiz 114,780,000		4 kampung Tahfiz 130,000,000		6 kampung Tahfiz 130,000,000		8kampung Tahfiz 130,000,000		10 kampung Tahfiz 130,000,000		10 kampung Tahfiz 634,780,000		
			Subuh Mubarakah	Jumlah Kegiatan Subuh Mubarakah Yang dilaksanakan		11 Kali 181,600,000		11 Kali 200,000,000		11 Kali 200,000,000		11 Kali 200,000,000		11 Kali 200,000,000		55 Kali 981,600,000		
			Peringatan Hari Santri	Jumlah laporan Peringatan Hari Santri Nasional di Kota Padang Panjang		1 laporan 300,000,000		1 laporan 400,000,000		1 laporan 456,262,500		1 laporan 1,500,000,000		1 laporan 524,761,875		5 laporan 3,181,024,375		
			Penyelenggaraan MTQ Nasional	Jumlah Laporan pelaksanaan		- -		- -		1 laporan 6,000,000,000		- -		- -		1 laporan 6,000,000,000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja/Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian dan Pembangunan Daerah				Persentase Implementasi kebijakan perekonomian		70.00		77.50		80.00		85.00		87.50		87.5	
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian			Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang		80		85		90		90		90		90	
	15		Program Peningkatan Koordinasi Perekonomian Daerah	Persentase Implementasi kebijakan perekonomian		90%	195,000,000	90%	300,000,000	90%	235,000,000	90%	190,000,000	90%	190,000,000	90%	1,110,000,000
			Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah monitoring Pengendalian Laju Inflasi daerah di Kota Padang Panjang		4 kali	50,000,000	4 kali	140,000,000	4 kali	50,000,000	4 kali	-	4 kali		20 kali	240,000,000
				Jumlah Survei standar biaya Hidup		0		1 kali		0		0		0		1 kali	
				Jumlah Survei Pemetaan Distribusi		0		0		1 kali		0		0		0	
			Koordinasi kebijakan urusan pertanian, industri rumah tangga, industri kecil Menengah	Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Koordinasi urusan pertanian, industri rumah tangga, industri kecil Menengah		4 kali	25,000,000									4 kali, 1 laporan	25,000,000
			Koordinasi Kebijakan Umum Pangan, Pertanian dan UMKM	Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan kebijakan umum Pangan, Pertanian dan UMKM		0	0	4 kali	30,000,000	4 kali	35,000,000	4 kali	40,000,000	4 kali	40,000,000	16 kali	145,000,000
			Monitoring dan Evaluasi Perkembangan KPRI Kota Padang Panjang	Jumlah KPRI yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi perkembangannya		26 KPRI	35,000,000	26 KPRI	40,000,000	26 KPRI	195,000,000						
			Koordinasi Kebijakan Bidang Sarana dan Kelembagaan ekonomi daerah	Jumlah monitoring dan evaluasi Kebijakan Bidang Sarana dan Kelembagaan ekonomi daerah yang dilaksanakan		4 kali	50,000,000	4 kali	43,000,000	4 kali	50,000,000	4 kali	50,000,000	4 kali	50,000,000	20 kali	243,000,000

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja/Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Koordinasi Kebijakan Umum Lingkungan	Jumlah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan Umum Lingkungan Hidup		1kali	35,000,000									1 kali , 1 dokumen	35,000,000
			Koordinasi Kebijakan Umum Lingkungan dan Penanaman Modal	Jumlah Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan Umum Lingkungan Hidup		0	0	4 kali	47,000,000	4 kali	60,000,000	4 kali	60,000,000	4 kali	60,000,000	16 kali	227,000,000
				<b>Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan</b>		<b>70</b>		<b>75</b>		<b>75</b>		<b>80</b>		<b>85</b>		<b>85</b>	
			<b>Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah</b>														
		16	<b>Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</b>		95%	453,430,000	95%	1,393,142,000	95%	1,402,988,300	95%	1,413,601,400	95%	1,426,266,610	95%	6,089,428,310
			Monitoring Terhadap Realisasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah OPD yang dimonitoring dan dievaluasi Pembangunan		12 Laporan	30,985,000									12 Laporan	30,985,000
			Monitoring Terhadap Realisasi Kegiatan Pembangunan dan Rapat Evaluasi	Jumlah OPD yang dimonitoring dan dievaluasi Pembangunan dan Sosialisasi Aplikasi Simbangda yang dilaksanakan				12 laporan dan 80 orang	70,000,000	12 laporan dan 80 orang	280,000,000						
			Pendidikan dan Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah peserta bimbingan dan pelatihan pengadaan secara elektronik (SPSE dan aplikasi pendukungnya)		110 orang	71,425,000	110 orang	80,000,000	550 orang	391,425,000						
			Operasional Maintenance LPSE	Jumlah Infrastruktur LPSE yang terpelihara		1 paket	78,000,000	1 paket	897,000,000	5 paket	3,666,000,000						
			Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi pokja ULP dan PPK		80 orang	28,860,000	80 orang	57,002,000	80 orang	61,052,300	80 orang	65,000,000	80 orang	70,000,000	400 orang	281,914,300
			Bimbingan Teknis dan Pembekalan Petugas Pengawas Teknis lapangan	Jumlah Bimbingan Teknis dan Pembekalan Petugas Pengawas Teknis lapangan		80 orang	17,080,000		-		0		-		-	80 orang	17,080,000
			Bintek Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Infrastruktur	Jumlah peserta Bintek Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Infrastruktur		80 orang	23,480,000		-		0		-		-	80 orang	23,480,000

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja/Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Fasilitasi Kerjasama dengan LKPP	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan		2 orang	33,600,000	2 orang	38,640,000	2 orang	44,436,000	2 orang	51,101,400	2 orang	58,766,610	8 orang	226,544,010
			Koordinasi Aksi Anti KKN Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Koordinasi Aksi Anti KKN Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa		80 org	170,000,000	80 org	170,000,000	80 org	170,000,000	80 org	170,000,000	80 org	170,000,000	400 orang	850,000,000
			Peningkatan pelayanan berstandar ISO 9001	Jumlah evaluasi ISO 9001 yang dilaksanakan				1 kali	80,500,000	4 kali	322,000,000						
			<b>Jumlah</b>				30,678,233,250		27,556,710,900		37,152,046,261		40,944,851,724		30,034,545,970		166,366,388,105

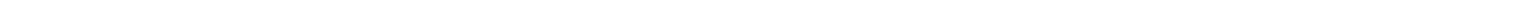
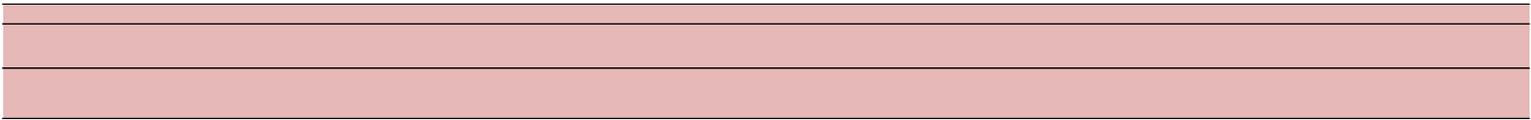
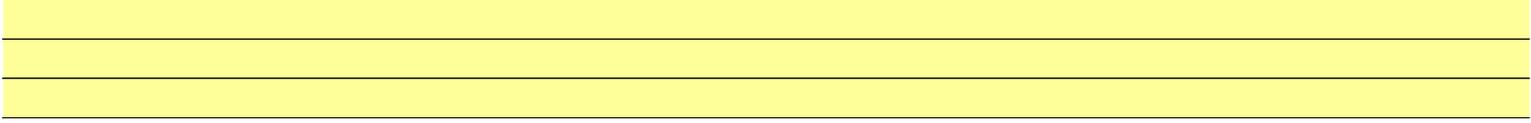




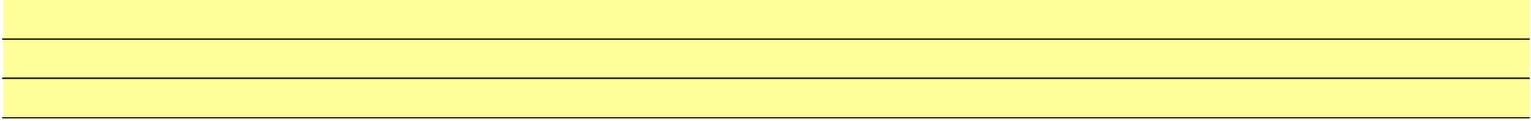
A series of horizontal black lines providing a writing area. There are 15 lines in total, spaced evenly down the page.



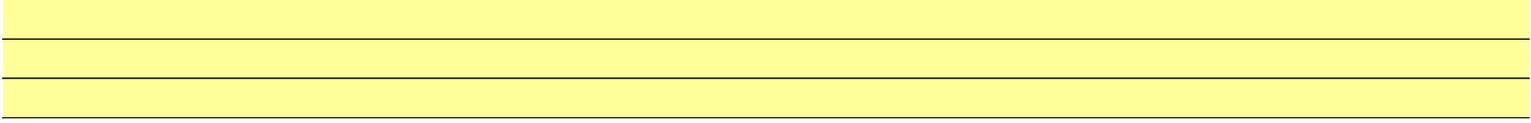
202,088,000
-------------



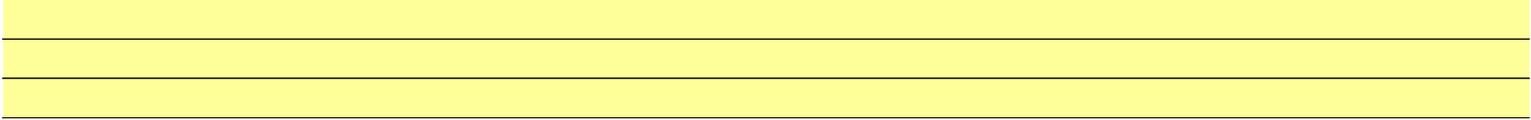


A series of horizontal black lines for writing, consisting of 16 lines spaced evenly down the page.



A series of horizontal black lines for writing, consisting of 18 lines spaced evenly down the page.





---

---

---

---

55,917,253,488

---

49,917,253,488

---

---

---

---

---

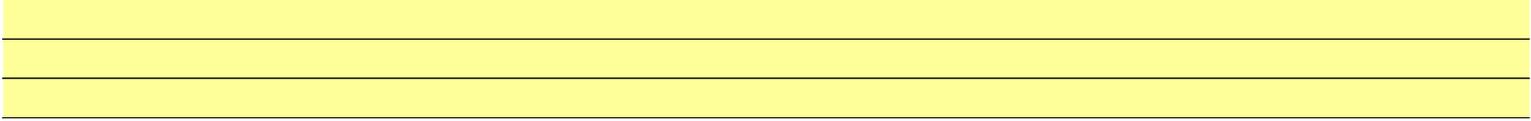
---

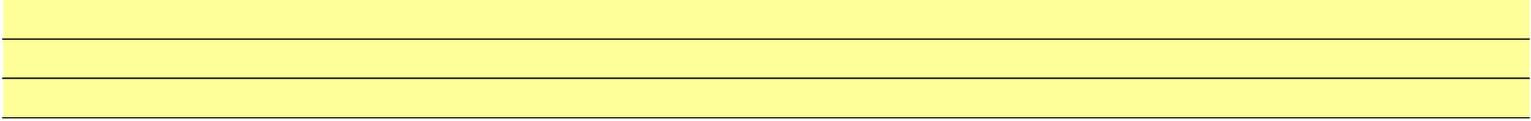
---

---

---

---

A series of horizontal black lines spaced evenly down the page, providing a template for writing. There are 15 lines in total, starting from the bottom of the yellow header bar and extending to the bottom of the page.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

